



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
JENIS INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010)**

SKRIPSI

**DINA WIDIANA
1006811633**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
JENIS INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**DINA WIDIANA
1006811633**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dina Widiana

NPM : 1006811633

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dina Widiana

NPM : 1006811633

Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi

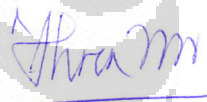
Judul Skripsi


– Indonesia : Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Jenis Industri Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)

– Inggris : The Analysis of Ownership structure and Industry Type's Influence on The Level of Corporate Social Responsibility Disclosure (Empirical Study on The Companies Listed on The *Bursa Efek Indonesia* 2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Purwatiningsih S.E., Ak., MBA., DEA ()

Penguji : Eliza Fatima S.E., M.E., CPA ()

Penguji : Catur Sasongko S.E., MBA ()

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 12 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati S.E., M.M., S.A.S

NIP : 19600317 198602 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT karena berkat ridho dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah semata-mata hasil karya penulis seorang diri, namun terdapat banyak pihak yang ikut memberikan kontribusi dalam skripsi ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT karena berkat Ridho-Nya saya bisa diberi kesempatan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Purwatiningsih, S.E., Ak., MBA., DEA yang telah dengan sangat sabar memberikan masukan, pengarahan, perhatian setulus hati dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak ya bu Ipung dan bapak untuk semuanya. Mohon maaf selama dalam penyelesaian skripsi ini saya banyak buat pusing ibu. Semoga ALLAH SWT membalas amal perbuatan baik ibu dan bapak.
3. Ibu Eliza Fatima S.E., M.E., CPA dan Bapak Catur Sasongko S.E., MBA sebagai dosen penguji yang telah banyak memberikan pertanyaan, pengarahan, kritik dan masukan demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Sri Nurhayati, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi yang telah memberikan kemudahan akademis bagi penulis selama program kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
5. Mama, papa, dan adik tercinta yang telah memberikan banyak doa, dukungan, perhatian, waktu demi terselesaikannya masa studi dan penyusunan skripsi ini.

6. Mas Mohamad Bayuseno, S.T., yang telah banyak memberikan dukungan, doa, perhatian, dan bantuan dengan sangat sabar selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Salemba, Ari Kristian, Kusuma Dewi Kapiharsi, Made Ariasta, Dinar P Listyani, Fauzah Avivi, Christine Sutanto, Herdy Pramita Putri Marsya Yulia Astari, Dinda Ayu Kartikasari, Mirna, Meldi Nur Fathina, Naufal, Mita, Hana Ayu, Wilda, Sartika, Dara, Debora, May, dkk yang telah banyak membantu dalam perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap selalu terjaga.
8. Sahabat gang nebeng, main, dan belajar, Keni Dwi Kania, Monicha Shalimar, Hajaar Anisa, dan Firma atas support disaat senang maupun sulit selama masa studi hingga akhir penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap selalu seperti ini, tetap selalu terjaga.
9. Teman-teman seperjuangan Depok, Dinar P Listyani, Fauzah Avivi, Herdy Pramita Putri atas support, doa, perhatian, dan tempat buat bermalamnya. Semoga persahabatan kita terus langgeng,
10. LPEM FEUI, Bu Bobby, Pak Rais, Bu Rini, Bu Liza, Pak Uka, Pak Ipik, Bu Thati, Bu Yetty, Pak Kasdi, Bu Yanti, dan Pak Zakir atas support, doa, dan pengertiannya hingga penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.

Akhir kata, penulis berharap agar ALLAH SWT bisa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Salemba, 12 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Widiana
NPM : 1006811633
Program Studi : S1 Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN JENIS
INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2010)**


beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba

Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan


Dina Widiana

ABSTRAK

Nama : Dina Widiana
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Jenis Industri Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis industri sebagai variabel independen, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol digunakan untuk mengeliminir kesalahan dalam membuat kesimpulan pada hasil penelitian.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 kecuali jenis industri perusahaan keuangan dan perbankan.

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis uji adjusted R square, uji statistik F, dan uji statistik t. Hasil analisis berdasarkan penggunaan seluruh variabel kontrol menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing, publik dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Kata-kata kunci : Tanggung jawab sosial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, jenis industri.

ABSTRACT

Name : Dina Widiana
Study Program : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul : The Analysis of Ownership structure and Industry Type's Influence on The Level of CSR Disclosure (Empirical Study on The Companies Listed on The *Bursa Efek Indonesia* 2010)

The objective of this study was to analyze the influence of government ownership, foreign ownership, public ownership, and type of industry on the level of corporate social responsibility disclosure. This study used government ownership, foreign ownership, public ownership, type of industry as independent variable, corporate social responsibility as dependent variable, and company size, leverage, profitability as control variables. Control variables are used to eliminate errors in making conclusions on the results of the study.

The data used was secondary data from annual report and sustainability report of all companies that were listed at Bursa Efek Indonesia on 2010, except for the companies operate in finance and banking industry.

This study used multiplied analysis linear regression, with adjusted R square, F statistic test, and statistical tests t to test the hypothesis. The analysis shows that the government ownership has significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure, while the foreign and public ownership, and the type of industry have no significant effect on the level of corporate social responsibility.

Keywords : Corporate social responsibility, government ownership, foreign ownership, public ownership, type of industry

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak / Abstract	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5.1 Ruang Lingkup.....	6
1.5.2 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	8
2.1.1 Latar Belakang Tata Kelola Perusahaan di Dunia	8
2.1.2 Definisi Tata Kelola Perusahaan.....	10
2.1.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan	11
2.1.4 Prinsip Tata Kelola Perusahaan	14
2.1.5 Teori – Teori Berkaitan Dengan Tata Kelola Perusahaan	26
2.1.5.1 Teori Agensi.....	26
2.1.5.2 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	28
2.1.5.3 Perubahan Prespektif Pemegang Saham (<i>Shareholder</i>) ke Prespektif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>).....	30
2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	32
2.2.1 Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	32
2.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.....	33
2.2.3 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	36
2.3 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	39
2.4 Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Pengungkapan.....	42
2.5 Pelaporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Reporting</i>)	44
2.6 Struktur Kepemilikan	47
2. 6.1 Struktur Kepemilikan di Berbagai Negara.....	47
2. 6.2 Kepemilikan Institusional	49
2. 6.3 Kepemilikan Manajerial.....	50
2. 6.4 Kepemilikan Pemerintah	51
2. 6.5 Kepemilikan Asing	52
2. 6.6 Kepemilikan Publik	53

2.7 Jenis Industri	54
2.7.1 Industri <i>High Profile</i>	54
2.7.2 Industri <i>Low Profile</i>	54
2.8 Ukuran (<i>Size</i>) Perusahaan	55
2.9 Profitabilitas Perusahaan.....	55
2.10 <i>Leverage</i> Perusahaan.....	56
2.11 Penelitian Terdahulu	56
3. METODOLOGI PENELITIAN	59
3.1 Kerangka Pemikiran.....	59
3.2 Pengembangan Hipotesis	59
3.2.1 Struktur Kepemilikan	56
3.2.2 Jenis Industri	61
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	62
3.3.1 Variabel Dependen.....	62
3.3.2 Variabel Independen	63
3.3.2.1 Kepemilikan Pemerintah	63
3.3.2.2 Kepemilikan Asing	63
3.3.2.3 Kepemilikan Publik	64
3.3.2.4 Jenis Industri.....	64
3.3.3 Variabel Kontrol.....	65
3.4 Populasi dan Sampel.....	66
3.5 Jenis dan Sumber Data	66
3.6 Metode Pengumpulan Data	67
3.7 Metode Analisis Data	67
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	67
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	67
3.7.2.1 Uji Normalitas	67
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas	68
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	68
3.7.2.4 Uji Hipotesis	69
3.7.3 Analisis Regresi Berganda	69
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
3.7.5 Uji Pengaruh Simultan (F tes).....	70
3.7.6 Uji Parsial (t tes).....	71
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	72
4.1.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	72
4.1.2 Kepemilikan Pemerintah.....	74
4.1.3 Kepemilikan Asing.....	74
4.1.4 Kepemilikan Publik.....	75
4.1.5 Jenis industri	75
4.1.7 Aktiva.....	82
4.1.8 <i>Leverage</i>	83
4.1.9 Profit.....	83
4.2 Hasil Penelitian.....	83
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	83

4.2.2 Uji Normalitas Data	86
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	86
4.2.3.1 Uji Multikolinearitas	86
4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas	89
4.2.3.3 Uji Autokorelasi	91
4.3 Uji Statistik	92
4.3.1 Uji <i>Adjusted R²</i> (Koefisien Determinasi)	92
4.3.2 Uji Signifikansi (Uji F)	93
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	94
4.4 Pengujian Hipotesis.....	96
4.4.1 Hubungan struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	96
4.4.2 Pengujian pengaruh struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	99
4.4.3 Pengujian pengaruh total aktiva, <i>leverage</i> , dan profit perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	102
5. KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Keterbatasan Penelitian	106
5.3 Saran.....	106
5.3.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	106
5.3.2 Saran untuk Perusahaan	106
5.3.2 Saran untuk Investor	107
5.3.3 Saran untuk Pemerintah atau Regulator.....	107
DAFTAR REFERENSI	108
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 4	Deskripsi Data Penelitian	72
Tabel 4.1.1A	Item Pengungkapan CSR.....	73
Tabel 4.1.1B	Item Perusahaan Dalam Tiap Industri	73
Tabel 4.1.2	Jumlah Rincian Kepemilikan Pemerintah	74
Tabel 4.1.3	Jumlah Rincian Kepemilikan Asing	74
Tabel 4.1.4	Jumlah Rincian Kepemilikan Publik	75
Tabel 4.2.1A	Statistik deskriptif (Laporan Tahunan).....	83
Tabel 4.2.1B	Statistik deskriptif (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	85
Tabel 4.2.2C	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Laporan Tahunan).....	88
Tabel 4.2.2D	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	88
Tabel 4.2.3A	Uji Multikolinearitas (Laporan Tahunan).....	90
Tabel 4.2.3B	Uji Multikolinearitas (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	90
Tabel 4.2.3C	Uji Korelasi Spearman (Laporan Tahunan).....	91
Tabel 4.2.3D	Uji Korelasi Spearman (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	91
Tabel 4.3.1A	Uji Adjusted R ² (Laporan Tahunan)	92
Tabel 4.3.1B	Uji Adjusted R ² (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	92
Tabel 4.3.2A	Uji Signifikansi (Laporan Tahunan).....	93
Tabel 4.3.2B	Uji Signifikansi (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	93
Tabel 4.3.3A	Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda (Laporan Tahunan).....	95
Tabel 4.3.3B	Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	95
Tabel 4.4.1A	Uji Korelasi Pearson (Laporan Tahunan).....	96
Tabel 4.4.1B	Uji Korelasi Pearson (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.8.3	Caroll's Pyramid.....	37
Gambar 3.1	Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4.1.5A	Indikator Ekonomi (Laporan Tahunan).....	77
Gambar 4.1.5B	Indikator Ekonomi (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	77
Gambar 4.1.5C	Indikator Lingkungan (Laporan Tahunan)	78
Gambar 4.1.5D	Indikator Lingkungan (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	78
Gambar 4.1.5E	Indikator Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (Laporan Tahunan).....	79
Gambar 4.1.5F	Indikator Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	79
Gambar 4.1.5G	Indikator Hak Asasi Manusia (Laporan Tahunan)	80
Gambar 4.1.5H	Indikator Hak Asasi Manusia (Laporan Tahunan dan Sustainability Report)	80
Gambar 4.1.5I	Indikator Masyarakat (Laporan Tahunan).....	81
Gambar 4.1.5J	Indikator Masyarakat(Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	81
Gambar 4.1.5K	Indikator Tanggung Jawab Produk (Laporan Tahunan).....	82
Gambar 4.1.5L	Indikator Tanggung Jawab Produk (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan).....	82
Gambar 4.2.2A	Grafik histogram distribusi normal (Laporan Tahunan).....	86
Gambar 4.2.2B	Grafik histogram distribusi normal (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan).....	86
Gambar 4.2.2C	Grafik normal plot (Laporan Tahunan)	87
Gambar 4.2.2D	Grafik normal pot (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	87
Gambar 4.2.3A	Hasil uji scatter plot (Laporan Tahunan).....	91
Gambar 4.2.3B	Hasil uji scatter plot (Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya lingkungan, masyarakat sekitar merupakan bagian dari perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu sudah seharusnya perusahaan memberi perhatian pada lingkungan sekitar sebagai rasa tanggung jawabnya. Laporan yang menggambarkan hal ini dinamakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). The World Business Council for sustainable Development (WBCSD, 2000) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan para karyawan beserta perwakilan keluarganya, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui cara yang bermanfaat baik bagi bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan.

Perusahaan akan melakukan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai wujud pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan telah melakukan kontribusi pelaksanaan praktek tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih terkenal dengan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social reporting*) yang berkembang menjadi pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) merupakan proses pengkomunikasian dampak-dampak sosial dan lingkungan atas aktivitas ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pemangku kepentingan secara keseluruhan (Anggraini, 2006).

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dimaksud adalah orang atau kelompok yang dipengaruhi dan mempengaruhi atas keputusan atau kebijakan perusahaan dan operasi perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan (Anggraini, 2006). Pemangku kepentingan tersebut mencakup para pemegang saham (*shareholder*), para karyawan perusahaan (*employees*), para pelanggan (*customers*), para pemasok (*suppliers*), para kreditur atau pemberi pinjaman (*lenders*), dan masyarakat (*society*) (Robert (1992) dalam Anggraini (2006)).

Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial membuat pemerintah sebagai regulator turut mengambil kebijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini terlihat dengan dibuatnya aturan mengenai kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c yang menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 disebutkan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan PP no 47 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mewajibkan seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan, dan mengharuskan perusahaan memasukkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam rencana kerja tahunan perusahaan.

Peraturan pemerintah terkini yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah PP No 27 tahun 2012 dan PP no 47 tahun 2012. PP 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan yang menyebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup). PP no 47 tahun 2012 pasal 6 memuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Adanya undang-undang ini menandakan adanya hubungan antara perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut bukan hanya berlaku untuk persero dan perum, akan tetapi berlaku bagi seluruh perusahaan. UU No 25 tahun 2007 menspesifikkan bagi pihak yang ikut serta dalam penanaman modal. Pihak yang ikut serta dalam penanaman modal sebagian besar sahamnya dimiliki oleh institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Siagian, 2011). Perusahaan dengan kepemilikan intitusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004 dalam Arif, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu terdapat juga pengaruh dari struktur kepemilikan manajerial dimana terdapat sejumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen), dan direksi.

Munculnya berbagai investor asing untuk berinvestasi pada perusahaan lokal ataupun multinasional menandakan keberhasilan perusahaan dalam membangun kepercayaan terhadap investor. Perusahaan-perusahaan asing khususnya perusahaan Eropa dan perusahaan Amerika umumnya sangat memperhatikan isu-isu sosial. Pengaruh dari perusahaan asing tersebutlah yang membawa pengaruh terhadap perusahaan lokal ataupun multinasional untuk lebih memperhatikan isu-isu dan dampak sosial perusahaan untuk menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Maka dari itu kepemilikan asing memungkinkan adanya pengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan asing maupun perusahaan lokal yang menjadi perusahaan publik akan mendapat sorotan lebih dari masyarakat. Semakin banyak saham yang dilepas maka kepemilikan dari perusahaan itu akan semakin menyebar. Penyebaran kepemilikan saham tersebut menandakan perusahaan memiliki kredibilitas yang tinggi dimata publik. Oleh sebab itu untuk menjaga legitimasi perusahaan,

perusahaan publik akan melakukan pengungkapan yang lebih terhadap tanggung jawab sosialnya (Badjuri, 2011).

Selain pengaruh dari kepemilikan perusahaan, pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin dapat dipengaruhi oleh jenis industri. Ada beberapa penelitian tentang hal itu. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suripto (2000) dengan membagi variabel jenis industri ke dalam bank dan non bank. Hasil penelitian Suripto tersebut menunjukkan bahwa jenis industri bank dan non bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya penelitian Subiyantoro (dalam Rahayu, 2006) menggunakan variabel jenis industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, hasilnya juga menunjukkan bahwa jenis industri manufaktur dan non manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) dengan menggunakan variabel jenis industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), hasilnya jenis industri jasa dan non jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Yuningsih (2003), Sembiring (2005), dan Anggraini (2006) dengan menggunakan variabel jenis industri yang dibagi ke dalam industri *high profile* dan *low profile* memberikan hasil yang signifikan. Hasil yang signifikan tersebut dapat dikarenakan oleh perusahaan yang bertipe *high profile* dalam melakukan aktivitasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap lingkungan seperti memodifikasi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat atau secara luas terhadap pemangku kepentingannya.

Berdasarkan penelitian Hackston&Milne (1996), dalam Sitepu dan Siregar (2007) ukuran perusahaan dan tipe industri memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan informasi sosial, sebaliknya tidak ditemukan hubungan antara laba dengan pengungkapan informasi sosial. Fitriani (2001), dalam Sitepu dan Siregar (2007) menemukan bahwa pengungkapan informasi sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, status perusahaan, profitabilitas dan KAP. Penelitian Sembiring (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan, namun tidak menemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan *leverage* dengan pengungkapan informasi sosial.

Penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) dengan melakukan analisis terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh industri *high profile* dan *low profile* dengan menambahkan variabel lain berupa struktur kepemilikan serta menggunakan variabel kontrol ukuran, profitabilitas dan *leverage*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
- b. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
- c. Apakah kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
- d. Apakah jenis industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas, yaitu :

- a. Mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
- b. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
- c. Mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
- d. Mengetahui pengaruh jenis industri terhadap tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan sehubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah mereka lakukan selama ini agar dapat menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di masa mendatang.
- b. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor maupun calon investor terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan karena tanggung jawab sosial perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Bagi pemerintah atau regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan ataupun masukan kepada pemerintah atau regulator dalam membuat peraturan maupun kebijakan mengenai aturan perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.
- d. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan hanya pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan tahun 2010 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk semua jenis industri kecuali industri yang bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan. Hal ini dikarenakan industri tersebut mempunyai peraturan tersendiri atau *high regulated* dan memiliki format yang berbeda dari jenis industri lainnya.

1.5.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan *non finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria :

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010.
2. Menerbitkan laporan tahunan yang lengkap.
3. Menerbitkan laporan keberlanjutan yang lengkap.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu definisi dari masing-masing indikator yang akan berhubungan dengan permasalahan, dimana teori-teori tersebut dianggap relevan dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian.

- **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, model penelitian beserta operasionalisasi variabel, serta metode pemilihan sampel dan pengolahan data atas sumber data yang ada.

- **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan analisis dari penelitian yang dilakukan dan juga akan dijelaskan bagaimana temuan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut.

- **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

2.1.1 Latar Belakang Tata Kelola Perusahaan

Perkembangan tata kelola perusahaan di Inggris dimulai pada akhir 1980-an dan awal 1990 yang dipacu dari skandal perusahaan seperti Polly Peck dan Maxwell dan kolapsnya bank BCCI. Penyimpangan pelaporan keuangan menyebabkan dibentuknya *Financial Aspects of Corporate Governance Committee* yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury. *Cadbury Report* yang dihasilkan oleh lembaga tersebut diterbitkan pada tahun 1992 menguraikan sejumlah rekomendasi untuk pemisahan peran/tugas atas *chief executive* dan *chairman*, komposisi yang seimbang dalam direksi, proses seleksi untuk direktur non-eksekutif, transparansi pelaporan keuangan, dan kebutuhan untuk internal control yang baik.

Skandal masih berlanjut pada awal tahun 2000, beberapa perusahaan besar di Amerika mengalami masalah besar salah satunya adalah runtuhnya perusahaan Enron. Kejadian itu telah menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintah akan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam kegiatan bisnis. Penyebab runtuhnya Enron ialah kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama dikarenakan lemahnya pengawasan yang independent oleh *corporate boards*. Selain skandal Enron, terdapat juga skandal kecurangan yang dialami WorldCom, Tyco yang berimbas pada peningkatan minat politik untuk mengharuskan adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik. Skandal-skandal tersebut merupakan salah satu pemicu dibentuknya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 serta pembentukan *Principles of Corporate Governance* oleh OECD tahun 2004.

Sedangkan di Asia termasuk di Indonesia telah terjadi krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 sebelum skandal Enron terjadi. Penelitian telah dilakukan oleh *Asian Development Bank* pada tahun 2000 untuk menemukan penyebab dari krisis ekonomi tersebut. Dari penelitian tersebut ditemukan 5 penyebabnya, yaitu

konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan, tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal, serta tidak memadainya pengawasan yang dilakukan oleh kreditor.

Krisis di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh kelima penyebab tersebut, tapi juga karena diikuti dengan krisis politik dalam negeri, dan ditambah lagi dengan lemahnya mekanisme berbagai institusi penyangga sistem perekonomian negara. Keadaan kemudian menjadi semakin parah oleh rendahnya kadar hukum sebagai benteng terakhir yang seharusnya bisa diharapkan menjamin tegaknya peraturan dari sistem yang ada (Lukviarman 2004). Dilihat dari banyaknya penyebab tersebut, tidak mengherankan jika Indonesia menjadi negara yang paling menderita serta paling lambat bangkit dari dampak krisis yang melanda negara-negara Asia (ADB, 2000).

Maka dari itu diperlukan adanya sebuah perbaikan dalam *good corporate governance* untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tata kelola perusahaan sendiri merupakan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Cadbury, 1992). Selain itu tata kelola perusahaan juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik pengawasan manajemen (OECD, 1999). Dalam jangka panjang penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan nilai perusahaan karena membangun kepercayaan investor, kreditor, serta pemegang saham terhadap kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan.

Pemerintah sebagai regulator dan aparatur negara menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999 didirikan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dan pada tahun 2004 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari

Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKCG sendiri telah menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (Pedoman Umum GCG) pada tahun 1999, kemudian pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, dan terakhir oleh KNKG pada tahun 2006. Pemerintah juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002. Kedua pedoman tersebut, akan memberikan petunjuk khusus dan masukan dalam praktek pengembangan tata kelola perusahaan.

Selain itu, dalam bidang pasar modal BAPEPAM juga ikut berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban emiten atau perusahaan publik memiliki setidaknya 30% dari seluruh dewan komisaris adalah dewan komisaris independen (SE-03/PM/2000) dan emiten atau perusahaan publik harus memiliki komite audit (KEP-41/PM/2003).

2.1.2 Definisi Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar KNKG (2006). Tata kelola perusahaan berhubungan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Berbagai lembaga mempunyai definisi tata kelola perusahaan tersendiri, diantaranya :

Menurut OECD (1999) tata kelola perusahaan di definisikan,

“Corporate Governance is the system by which business operations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the

company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

World Bank (1999) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai:

“...blend law, regulation and appropriate voluntary private sector practices which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long-term economic value for its shareholders and society as a whole”.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG 2000) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai :

“proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya”

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2000) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”

Definisi-definisi tersebut mengandung arti bahwa tata kelola perusahaan menjadi suatu upaya pengelolaan atas suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai nilai optimal bagi pemangku kepentingannya dengan kata lain Tata kelola perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Bapepam-LK (2006) mengungkapkan bahwa saat ini penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi dunia usaha secara umum tetapi juga secara khusus sangat penting bagi pengembangan industri pasar modal Indonesia. Hingga saat ini, Peraturan Bapepam secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Banyak manfaat yang akan didapat oleh perusahaan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. KNKG (2006) menjabarkan manfaat tersebut diantaranya:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham. Anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Selain itu menurut *International Corporate Governance Network (ICGN)* dalam *ICGN Corporate Governance Principles : Revised (2009)* menyatakan bahwa dengan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, perusahaan mampu mengambil

keputusan secara lebih baik untuk melindungi dan menambah nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Dewan dengan standar tata kelola perusahaan yang tinggi mampu membuat keputusan strategi yang kokoh guna meningkatkan efektivitas pengawasan operasional oleh manajemen dan untuk memonitor pendekatan yang terkait dengan manajemen resiko yang nantinya akan meningkatkan *return investor* dari waktu ke waktu.

Penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya dilakukan pada perusahaan publik tetapi juga pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, tata kelola perusahaan bertujuan untuk :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
- c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Menyukseskan program privatisasi

Banyaknya manfaat yang didapat dari tata kelola perusahaan yang baik maka sudah seharusnya perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan nilai dari perusahaan dan memberikan kesejahteraan bagi pemangku kepentingannya.

2.1.4 Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdapat berbagai prinsip untuk mendukung pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dalam OECD (2004) dan KNKG (2006), Kepmen BUMN 117, yaitu :

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD (2004) :

1. Memastikan Kerangka Dasar untuk Tata Kelola Perusahaan yang Efektif.

Kerangka tata kelola perusahaan dibangun untuk meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, serta konsisten dengan aturan hukum. Kerangka tata kelola juga harus jelas dalam mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara berbagai pengawasan, pihak berwenang, dan penegakan hukum.

Untuk memastikan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif, diperlukan adanya landasan hukum, peraturan dan kelembagaan yang tepat dan efektif agar seluruh peserta dapat mengandalkan pasar dalam membangun hubungan kontraktual pribadi mereka. Landasan hukum, peraturan, dan kelembagaan tersebut tentunya harus selalu diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada. Prinsip 1 OECD ini terdiri dari empat subprinsip, yaitu:

- a. Kerangka tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan pandangan terhadap dampak yang dihasilkan kepada kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar dan menciptakan insentif bagi pelaku pasar, dan meningkatkan pasar yang transparan dan efisien.
- b. Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktek tata kelola perusahaan di wilayah hukum harus konsisten dengan aturan hukum, transparan dan dapat dilaksanakan.
- c. Pembagian tanggung jawab antara otoritas yang berbeda dalam yurisdiksi harus diungkapkan dengan jelas dan memastikan bahwa kepentingan umum disajikan.
- d. Pengawas, pihak berwenang dan penegak hukum harus memiliki wewenang, integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugas mereka secara profesional dan obyektif. Selain itu, keputusan mereka harus tepat waktu, transparan dan sepenuhnya dapat dijelaskan.

2. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci

Pemegang saham mempunyai hak atas informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi perusahaan. Kerangka tata kelola perusahaan harus dapat melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan investor untuk berpartisipasi dalam keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan kewajiban terbatas pada jumlah investasi tertentu.

Namun pada prakteknya, perusahaan tidak bisa dikelola oleh referendum pemegang saham. Susunan kepemilikan saham terdiri dari individu ataupun lembaga yang memiliki kepentingan, tujuan, dan juga kemampuan yang bervariasi. Prinsip OECD 2 lebih dalam membagi prinsip hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci sebagai berikut :

- a. Hak pemegang saham dasar harus mencakup hak untuk: 1) metode yang aman untuk pencatatan kepemilikan, 2) menyampaikan atau mentransfer saham, 3) memperoleh informasi yang relevan dan material pada perusahaan secara tepat waktu dan teratur, 4) berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum, 5) memilih dan menghapus anggota dewan, dan 6) bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Pemegang Saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, dan memiliki informasi yang cukup tentang, keputusan mengenai perubahan mendasar perusahaan seperti: 1) perubahan atas undang-undang, atau anggaran dasar atau dokumen sejenisnya yang mengatur perusahaan; 2) otorisasi dari saham tambahan, dan 3) transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, bahwa dalam hasil efek dalam penjualan perusahaan.
- c. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham umum dan harus diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur pertemuan pemegang saham umum.

- d. Struktur Modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan saham mereka harus diungkapkan.

Beberapa struktur modal memungkinkan pemegang saham untuk melaksanakan tingkat kontrol atas perusahaan yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya di perusahaan. Piramida struktur, kepemilikan saham silang dan saham dengan hak suara yang limited atau multiple dapat digunakan untuk mengurangi kemampuan noncontrolling pemegang saham untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan serta jika ada mekanisme lain untuk mendistribusikan pengaruh pemegang saham pada kebijakan perusahaan, harus diungkapkan.

- e. Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan.
- f. Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.
- g. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain tentang isu-isu mengenai hak pemegang saham dasar mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip ini, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.

3. Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham.

Kerangka tata kelola perusahaan harus menjamin keadilan yang merata terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing.

- a. Semua pemegang saham seri yang sama dalam suatu kelas harus diperlakukan dengan sama.
- b. Insider Trading dan Abusive Self-Dealing harus dilarang.
- c. Anggota Dewan, dan key executive harus mengungkapkan kepada dewan apakah mereka secara langsung atau tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan yang material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung mempengaruhi perusahaan.

4. Peran pemangku kepentingan dalam suatu tata kelola perusahaan.

Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.

Perusahaan harus menyadari bahwa kontribusi para pemangku kepentingan merupakan sumber daya berharga dalam membangun perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang perusahaan harus mengembangkan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan.

- a. Hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum maupun dari suatu perjanjian harus dapat saling dihormati. Bahkan di daerah yang tidak diatur mengenai kepentingan pemangku kepentingan, sering dibuat tambahan komitmen untuk para pemangku kepentingan.
- b. Ketika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Kerangka dan proses hukum harus transparan dan tidak boleh menghambat pemangku kepentingan dalam berkomunikasi dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak.
- c. Meningkatkan mekanisme partisipasi karyawan harus diizinkan dalam rangka pengembangan. Tingkat partisipasi karyawan dalam suatu perusahaan sangat bergantung dari hukum nasional dan praktek dan dapat sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lain.
- d. Pada saat pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan mereka harus memiliki akses informasi yang relevan, informasi yang cukup dan dapat diandalkan, tepat waktu, dan teratur untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
- e. Pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka harus dapat bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mereka mengenai praktek ilegal dan tidak etis oleh para pejabat perusahaan.

Bahkan beberapa perusahaan telah membentuk ombudsman untuk menangani keluhan. Beberapa regulator juga mendirikan rahasia telpon dan fasilitas e-mail untuk menerima keluhan-keluhan tersebut.

- f. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan dapat meminjam dengan jumlah yang lebih banyak dan jangka waktu yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki catatan yang buruk dan operasi pasar yang tidak transparan.

5. Pengungkapan dan Transparansi

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dibuat berdasarkan seluruh hal yang material tentang perusahaan, termasuk situasi keuangan perusahaan, performa perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan dari perusahaan.

Prinsip-prinsip OECD ini akan mendukung pengungkapan yang tepat waktu mengenai segala hal yang timbul selama periode pelaporan. Mereka juga mendukung secara simultan pelaporan informasi kepada seluruh pemegang saham untuk memastikan mereka mendapat perlakuan yang sama. Dalam menjaga hubungan antara investor dan para partisipan pasar, perusahaan harus berhati-hati agar tidak melanggar prinsip dasar dari equitable treatment.

- a. Pengungkapan harus memasukan, tapi tidak terbatas pada, informasi yang material di dalam :
 - Hasil keuangan dan operasi perusahaan
 - Tujuan perusahaan
 - Kepemilikan saham utama dan hak pengambilan suara
 - Kebijakan remunerasi dari anggota dewan dan eksekutif, dan informasi mengenai anggota dewan, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, jabatan direktur perusahaan lain dan apakah mereka independent layaknya dewan komisaris
 - Transaksi kepada pihak yang saling terkait (*Related Parties*)
 - Faktor resiko yang dapat diramalkan
 - Isu mengenai pegawai dan pemangku kepentingan lainnya

- Struktur tata kelola dan kebijakan, secara khusus, yang berisikan tentang kode dan kebijakan tentang tata kelola perusahaan dan proses bagaimana hal tersebut diimplementasikan
- b. Informasi harus dipersiapkan dan diungkapkan seiring dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan pengungkapan keuangan dan non-keuangan.
- Aplikasi dari standar dengan kualitas yang tinggi diharapkan memperbaiki kemampuan investor dalam mengawasi perusahaan secara signifikan dengan memberikan keandalan dan komparabilitas dari pelaporan yang meningkat, dan memperbaiki pandangan atas performa perusahaan.
- c. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi untuk memberikan keyakinan kepada Dewan Direksi dan Para Pemegang Saham bahwa laporan keuangan secara wajar menggambarkan posisi keuangan dan performa perusahaan dalam hal yang material.
- d. Auditor Eksternal harus akuntabel kepada para pemegang saham memberikan tugas bagi perusahaan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan audit.
- Prinsip ini menggarisbawahi bahwa auditor eksternal harus menjaga *due to professional care* kepada perusahaan dibanding kepada manajer perusahaan dimana mereka saling berinteraksi untuk tujuan pekerjaan mereka.
- e. Cara untuk penyaluran informasi harus memberikan akses yang sama, tepat waktu, dan efisiensi biaya ke informasi yang relevan oleh para pengguna informasi.
- f. Kerangka Tata Kelola Perusahaan harus dilengkapi dengan pendekatan efektif yang menunjukkan dan mengenalkan provisi dari analisis atau saran dari analis, broker, rating agencies dan lainnya, yang relevan bagi

keputusan investor, bebas dari konflik kepentingan yang material yang dapat membahayakan integritas dari analisis dan saran.

6. Tanggung Jawab Dewan

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan strategis bimbingan perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan untuk perusahaan dan para pemegang saham.

Agar dewan dapat secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka. Maka dewan harus mempunyai tujuan dan penilaian independen. Dewan juga tidak hanya bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham tetapi juga memiliki kewajiban untuk bertindak dalam kepentingan terbaik mereka.

- a. Anggota Dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap secara baik dengan ketekunan agar tercipta kepentingan yang terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham.
- b. Ketika keputusan dewan mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
- c. Dewan harus melaksanakan standar etika yang tinggi. Untuk kepentingan pemangku kepentingan
Dewan memiliki peran sentral dalam menetapkan etika dari sebuah perusahaan, tidak hanya oleh tindakan sendiri, tetapi juga dalam menunjuk dan mengawasi eksekutif dan manajemen secara umumnya. Standar etika yang tinggi merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan sebagai sarana untuk membuatnya kredibel dan dapat dipercaya. Untuk membuat tujuan dari dewan berjalan dengan baik dan jelas, banyak perusahaan telah menemukan itu berguna untuk mengembangkan kode etik perusahaan berdasarkan, antara lain, standar profesional dan standar perilaku lainnya yang lebih luas.
- d. Dewan harus memenuhi fungsi utama, yaitu:
 - Evaluasi strategi perusahaan, rencana kegiatan utama, resiko peraturan, anggaran tahunan dan rencana bisnis; tujuan perusahaan;

implementasi pengawasan dan performa perusahaan; dan mengawasi modal kerja utama, akuisisi dan divestasi.

- Mengawasi efektivitas praktek tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang dibutuhkan.
 - Memilih, mengkompensasi, mengawasi dan bila dibutuhkan, mengganti eksekutif utama dan membuat rencana urutan pengawasan.
 - Jajaran eksekutif utama dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham jangka panjang.
 - Meyakinkan proses pencalonan dan pemilihan yang formal dan transparan,
 - Mengawasi dan mengatur konflik kepentingan manajemen yang mungkin terjadi, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk isu aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi dengan pihak ketiga.
 - Meyakinkan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, dan kontrol sistem yang ditempatkan secara sesuai, dalam hal, sistem untuk resiko manajemen, keuangan dan kontrol operasional, serta memenuhi hukum dan standar yang relevan.
 - Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- e. Dewan harus mampu melaksanakan tujuan penilaian independen pada perusahaan
- f. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menurut KNKG (2006) :

Terdapat 5 prinsip menurut pedoman Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG, yaitu :

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menurut Kepmen BUMN 117

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dimaksud dalam Keputusan Menteri BUMN 117 meliputi:

- a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diformulasikan dengan kondisi dan budaya organisasi atau perusahaan. Namun kesuksesan dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan bergantung kepada komitmen perusahaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara bertahap. Pada mulanya perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Perusahaan juga harus memberikan karyawan pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang akan dijalankan perusahaan. Dengan demikian diharapkan tercapainya penerapan prinsip tata kelola dalam perusahaan.

2.1.5 Teori – Teori Berkaitan Dengan Tata Kelola Perusahaan

2.1.5.1 Teori Agensi

Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam suatu perusahaan akan muncul *agency relationship* jika terdapat suatu hubungan yang bersifat kontraktual antara pihak pemilik atau pemegang saham (prinsipal) dengan pihak manajemen (agen). Hubungan *agency relationship* tersebut yang memunculkan teori agensi dimana agen tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan *value* sesuai yang diinginkan oleh prinsipal. Pada kenyataannya, kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda sehingga terjadilah permasalahan atau konflik diantara kedua belah pihak tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Konflik tersebut biasanya terjadi karena manajer cenderung untuk mencoba memprioritaskan kepentingan pribadi. Sedangkan pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajemen tersebut karena akan menimbulkan biaya perusahaan dan mengurangi manfaat yang diterima pemegang saham. Menurut Alijoyo dan Zaini (2004) dalam Farida (2012), konflik kepentingan tersebut merupakan asumsi dasar yang membangun *agency theory* yang dijabarkan sebagai berikut :

1. *Agency Conflict*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, *agency conflict* dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan yang bertentangan antara manajemen dan pemegang saham. *Agency conflict* bisa timbul karena berbagai hal berikut ini:

a. *Moral Hazard*

Manajemen akan memilih investasi sesuai dengan kemampuan dirinya, bukan sesuai dengan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

b. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil karena apabila terjadi kenaikan tinggi akan pendapatan perusahaan dikhawatirkan manajemen tidak dapat mendapatkan pendapatan tersebut di periode berikutnya sehingga kinerja manajemen dianggap menurun. Sedangkan pemegang saham lebih senang jika tingkat

pendapatan perusahaan semakin besar yang mengartikan keuntungan yang lebih banyak yang didapat dirinya.

c. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung akan mengambil posisi yang aman dalam keputusan investasi. Manajemen akan menghindari keputusan yang menambah resiko perusahaan walaupun hal tersebut belum tentu merupakan yang terbaik bagi perusahaan.

d. *Time Horizon*

Manajemen kebanyakan hanya memperhatikan arus kas perusahaan sesuai dengan waktu penugasan mereka atau dengan kata lain kurang memperhatikan proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan.

2. *Agency Problem*

Agency problem ditimbulkan dari adanya kesenjangan antara kepentingan manajemen sebagai pihak pengelola dengan kepentingan pemegang saham sebagai pemilik. Manajemen cenderung untuk mencoba memberikan prioritas untuk kepentingan pribadi dengan perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik. Sedangkan pemegang saham mungkin tidak menyukai kepentingan pribadi manajemen tersebut karena akan menambah biaya perusahaan, akan mengurangi manfaat yang diterima.

Menurut Jansen dan Meckling (1976), *agency problem* yang timbul dapat memunculkan suatu biaya yang dikenal dengan *agency cost*. *Agency cost* sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. Berikut penjelasan masing-masing *cost* tersebut :

- *Monitoring cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen yang dapat merugikan prinsipal. *Monitoring cost* dapat berupa biaya audit, peraturan operasi, pembatasan anggaran.

- *Bonding cost* merupakan biaya yang muncul karena adanya mekanisme pembatasan tindakan yang dilakukan manajer dengan keinginannya sendiri. Contoh dari *bonding cost* adalah pembuatan *quarterly report* oleh manajer secara sukarela sebagai sarana komunikasi dengan prinsipal.
- *Residual Loss* merupakan kerugian yang ditanggung oleh prinsipal akibat dari tindakan agen yang belum sesuai dengan keinginan prinsipal walaupun *monitoring cost* dan *bonding cost* sudah dikeluarkan. Tindakan tersebut dapat berupa penggantian nilai dari akun-akun tertentu pada *quarterly report* yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan bonus yang lebih besar.

Teori agensi juga dapat dikaitkan dengan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapannya. (Cowen dkk, 1987; Adams, 2002; dan Campbell, 2000 dalam Farook dan Lanis, 2005). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen dalam memperlihatkan kinerjanya, khususnya kinerja sosial kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari pemilik modal. Gray et, al. (1987) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa laporan tanggung jawab sosial merupakan perluasan tanggung jawab organisasi di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham.

2.1.5.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Freeman (1994) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan.

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya. Fokus dari teori pemangku kepentingan diartikulasikan kedalam dua inti (Freeman 1994, dalam Freeman 2004). Pertama apa tujuan dari perusahaan? hal ini yang mendorong manajer untuk mengartikulasikan

nilai yang dibuat perusahaan dan membawanya bersama dengan kepentingan pemangku kepentingan. Perusahaan didorong kedepan untuk menghasilkan kinerja yang baik melalui penetapan tujuan perusahaan dan metrik pasar keuangan (Freeman 2004). Inti yang kedua adalah apa yang harus manajemen lakukan kepada para pemangku kepentingannya? Hal ini memaksa manajer untuk mengartikulasikan bagaimana melakukan bisnis yang mereka inginkan dan tetap menjaga hubungan dengan pemangku kepentingannya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan (Freeman , 2004).

Dua inti dari teori pemangku kepentingan tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan pemangku kepentingan kepada perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingannya disamping usaha perusahaan untuk memaksimalkan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Roberts (1992) dalam Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu *stakeholder power*, *strategic posture*, dan kinerja ekonomi mempunyai hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Pemangku kepentingan itu sendiri terdiri dari *stockholders*, *creditors*, *employees*, *customers*, *suppliers*, *public interest groups*, dan *governmental bodies* (Roberts (1992) dalam Anggarini (2006)).

Pentingnya peran pemangku kepentingan dalam perusahaan membuat perusahaan harus mengatur pemangku kepentingannya. Adapun cara-cara yang dilakukan tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman 1985, dalam Ghozali dan Chariri 2007). Organisasi atau perusahaan dapat mengadopsi cara aktif atau pasif dalam menangani pemangku kepentingannya. Strategi aktif dilakukan apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang dianggap penting. Sedangkan strategi pasif dilakukan apabila perusahaan tidak memonitor secara terus menerus pemangku kepentingannya dalam arti lain pemangku kepentingan ini tidak dianggap terlalu penting oleh perusahaan (Ullman 1985, dalam Ghozali dan Chariri 2007). Akan tetapi sebaiknya perusahaan juga selalu memperhatikan pemangku kepentingan minoritas karena

apabila kurangnya perhatian perusahaan terhadap pemangku kepentingan tersebut bisa mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial perusahaan.

2.1.5.3 Perubahan Prespektif Pemegang Saham (*Shareholder*) ke Prespektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Menurut Blair (1995) dalam Lukviarman (2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang meliputi aspek hukum, budaya dan kelengkapan institusional lainnya yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan, pihak mana yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan dan bagaimana pengendalian dilaksanakan, serta bagaimana resiko dan manfaat dari berbagai aktivitas tersebut dialokasikan. Perusahaan melaksanakan dan mengelola kegiatannya di dalam lingkup sistem dimana perusahaan berada dengan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Keberagaman lingkungan atau tata kelola perusahaan diberbagai negara muncul karena adanya perbedaan budaya, aspek legal, serta perangkat institusional lainnya. Oleh karena itu muncullah dua perspektif dalam tata kelola perusahaan yaitu perspektif pemegang saham dan perspektif pemangku kepentingan (Lukviarman, 2005).

Perspektif pemegang saham cenderung dianggap tradisional karena mempunyai pandangan bahwa perusahaan merupakan instrumen legal pemilik dalam memaksimalkan kepentingannya berupa keuntungan atau investasi yang dilakukan (Lukviarman, 2005). Jika dilihat dari sisi ideologis dan teoritis, perspektif ini didasarkan pada kekuasaan tertinggi dari hak kepemilikan individu yang merupakan landasan prinsip kapitalisme (Letza, Sun, dan Krikbride 2004).

Pada perkembangan perspektif pemegang saham hingga abad ke-20, berkembang isu sentral mengenai apakah kepentingan pemegang saham dapat diproteksi secara efektif dengan perangkat legal dan institusional yang ada. Maka dari itu muncullah prespektif pemangku kepentingan yang mempunyai pandangan bahwa perusahaan sudah seharusnya mengacu kepada peningkatan kesejahteraan berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dibanding hanya kepada para pemilik

perusahaan (*shareholder*). Prespektif ini umumnya memberikan penekanan pada empat hal yaitu penekanan kepada perlunya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan, hubungan kontraktual jangka panjang antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, hubungan berbasis kepercayaan, dan etika bisnis antara perusahaan dengan pihak lainnya (Letza, Sun, dan Krikbride 2004).

Perkembangan dari prespektif pemegang saham kepada prespektif pemangku kepentingan, menimbulkan sebuah perbandingan, manakah prespektif yang lebih baik? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung kepada lingkungan perusahaan dimana perusahaan berada dengan mempertimbangkan aspek budaya, hukum, serta perangkat institusional lainnya. Hal ini sesuai dengan OECD (1999) "*one-size-does-not-fits-all*" dalam mengakomodasi berbagai perbedaan serta sebagai isyarat dinamisnya konsep tata kelola perusahaan dalam praktik (Lukviarman, 2004).

Menurut penelitian Lukviarman (2004) Indonesia mempunyai karakteristik tata kelola perusahaan yang mengikuti pola tata kelola perusahaan pada negara *Continental European* yang berbasis pada bank. Negara yang menganut sistem ini peranan mekanisme pasar sebagai perangkat pengendalian didalam mendisiplinkan perusahaan, sebagaimana terdapat pada *market-dominated system*, relatif tidak signifikan (Schmidt dan Tyrell 1997, dalam Lukviarman 2005). Karakteristik utama dalam sistem ini adalah kecenderungan stabil dan terkonsentrasi struktur kepemilikannya. Karakteristik tersebut lebih sesuai dengan prespektif pemangku kepentingan.

Masyarakat di Indonesia mempunyai kecenderungan berlawanan dengan nilai masyarakat yang kapitalistik. Maka dari itu umumnya di Indonesia menggunakan pemahaman prespektif pemangku kepentingan daripada prespektif pemegang saham. Akan tetapi, prepektif pemangku kepentingan yang digunakan ditemukan nilai yang tidak kompatibel antara konsep dan praktik (Lukviarman, 2005).

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

2.2.1 Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Seiring berkembangnya peradaban masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap lingkungannya dan merubah pandangan masyarakat mengenai dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengeluarkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak tersebut menimbulkan suatu tekanan dan tuntutan bagi perusahaan akan tanggung jawab sosialnya. Semula tanggung jawab perusahaan hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), diperluas menjadi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga.

Pada tahun 1950-1960 tanggung jawab sosial masih dipahami secara tradisional atau sederhana. Howard R Bowen (1953) dalam Nor Hadi (2011) memberikan rumusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :

“.. it refers to the obligations of businessmen to persue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”

Karakter tanggung jawab sosial yang terbentuk pada era tersebut dapat disebabkan oleh:

1. Tanggung jawab sosial muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis secara personal, sehingga tanggung jawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang ditunjukkan pada masyarakat sekitar (Hadi, 2011)
2. Wujud tanggung jawab sosial bersifat sukarela dan insidental, yang tergantung pada kesadaran dan keinginan pemodal (Yusuf, 2007)
3. Tipe kontrak pelaksanaan yang menjadi dasar tanggung jawab sosial bersifat *stewardship principle*. (Ismail, 2008)

Pada tahun 1970-1980 perkembangan tanggung jawab sosial sudah terlihat dengan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai orientasi pada berbagai kegiatan, adanya pertimbangan akan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam suatu kegiatan, orientasi pada kegiatan-kegiatan yang bukan hanya ditujukan semata-mata untuk kebajikan pemilik.

Pada tahun 1990-an hingga sekarang perkembangan tanggung jawab sosial diwarnai dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau pendekatan *civil society* (Yusuf, 2007). Ragam pendekatan tersebut telah membawa pengaruh praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk pemberdayaan. Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 menerbitkan laporan yang berjudul “*Our Common Future*” juga dikenal sebagai *Brundtland Report*. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang mempunyai tujuan untuk mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini dijadikan dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Di Indonesia, istilah tanggung jawab sosial perusahaan semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun namanya bukan tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi secara faktual aksinya mendekati konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional (Suharto, 2008).

Pada awal perkembangannya, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melalui lembaga. Tanggung jawab sosial perusahaan tataran ini hanya sekadar berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang

melakukannya termasuk dalam kategori "perusahaan impresif", yang lebih mementingkan "tebar pesona" (promosi) ketimbang "tebar karya" (pemberdayaan) (Suharto, 2008).

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan pengembangan komunitas kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development* (Wisnu, 2009). Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *need assesment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. Tanggung jawab sosial perusahaan pada tataran ini tidak sekadar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wisnu, 2009)

Model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga bermacam-macam. Setidaknya terdapat empat model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang umum digunakan di Indonesia (Wisnu, 2009). Keempat model tersebut antara lain:

1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya

perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain; Danamon peduli, Samporna Foundation, kemudian PT. Astra International yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra dan Unilever peduli Foundation (UPF).

3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media masa dan organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang di kenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh lain adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompot Dhuafa, Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya.
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu (Wisnu, 2009).

Pada tahun 2005 di Indonesia baru terdapat 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakannya dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Angka ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Pada tahun 2005 Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen mengadakan *reward* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan dalam Indonesia Sustainability Award (ISRA). Kategori penghargaan yang diberikan adalah *Best Social and Environmental Report Award*, *Best Social Reporting Award*, *Best Environmental Reporting Award*, dan *Best Website*.

Pada tahun 2006 diadakan penambahan award menjadi *Best Sustainability Reports Award*, *Best Social and Environmental Report Award*, *Best Social Reporting*

Award, Best Website, Impressive Sustainability Report Award, Progressive Social Responsibility Award, dan Impressive Website Award.

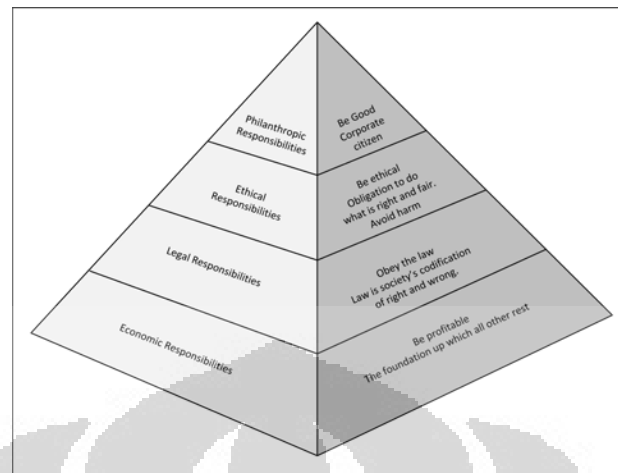
Pada tahun 2007 terdapat perubahan kategori dengan meniadakan kategori *impressive* dan *progressive* dan menambah penghargaan khusus berupa *Commendation for Sustainability Reporting* yaitu *First Time Sustainability Report*. Umumnya perusahaan tambang, BUMN, dan otomotif yang mendominasi keikutsertaan dalam ISRA ini. Tahun 2008 penghargaan ISRA dibagi menjadi kategori *Best Sustainability A, Best Sustainability B, Best Sustainability C, Best Sustainability D, Best CSR Reporting in Laporan tahunan*. Tahun 2009 ISRA merubah kembali kategori penghargaan menjadi *best sustainability reporting* berdasarkan kelompok sesuai dengan yang ada di kriteria Laporan tahunan Award dan Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2010 tidak ada perubahan kategori penghargaan ISRA dari tahun 2009. Peserta yang mengikuti ISRA pada tahun ini mencapai 23 perusahaan dengan pemenangnya adalah perusahaan Antam dengan memenangkan 4 kategori ISRA.

2.2.3 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Boone dan Kurtz (2007), pengertian tanggung jawab sosial (*social responsibility*) secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Runhar dan Lafferty (2009) dalam Dilling (2009) mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan secara sederhana sebagai cara untuk mempertahankan legitimasi dan menghindari publisitas yang buruk. *The World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD, 2000) mengartikan Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).

Caroll (1991) membagi Tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat bagian yang digambarkan melalui sebuah piramid seperti pada gambar 2.1.8.3.



Gambar 2.1.8.3 Carroll's Pyramid

Bagian paling bawah dari piramid adalah tanggung jawab ekonomi yang membentuk dasar dari tanggung jawab lainnya. Di saat tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*) terbentuk, maka ada tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum (*legal responsibilities*) sebagai kodifikasi yang dapat diterima masyarakat atas perbuatan yang dapat diterima dan tidak diterima masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*) yang menciptakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak dan keadilan serta menghindari dampak yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan ketiga landasan tanggung jawab tersebut diharapkan perusahaan dapat menjadi warga yang baik dengan tanggung jawab kedermwanaan (*philanthropic responsibilities*).

Keempat tanggung jawab yang diungkapkan oleh Carroll (1991) dapat membentuk konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah strategi dalam operasi bisnis dimana perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan maksud lebih kepada untuk menarik simpati *customer* sekaligus mengiklankan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. *Customer* yang tertarik akan memberikan nilai plus kepada perusahaan.

Hal ini akan berujung kepada bertambahnya pendapatan yang dicapai perusahaan. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan mencari laba (*profit*), menyejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet (*planet*).

Global Compact Initiative (GCI, 1997) menyebut konsep ini dengan 3P, yaitu *Profit* (*effectivity, efficiency, flexibility dan cerativity*), *People* (*helath, safety and welfare*), dan *Planet* (*enviromental quality and disturbances*) dimana gagasan tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Elkington (1997) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*Profit, People, and Planet*). Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Elkington, 1997).

Dauman dan Hargraves (1992) dalam Rawi (2008) membagi areal tanggung jawab perusahaan dalam tiga level, yaitu :

1. *Basic Responsibility* merupakan tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, misalnya kewajiban membayar pajak, mematuhi aturan hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.
2. *Organizational Responsibility* menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan pemangku kepentingan seperti : pekerja, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat sekitarnya.
3. *Societal Responsibility* menjelaskan tahapan ketika interkasi antar bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan perusahaan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat secara positif sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara masyarakat dan perusahaan tidak berjalan harmonis menjadi hambatan dan masalah perusahaan dalam kegiatannya. Berdasarkan pengelompokkan, terdapat empat manfaat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perusahaan (Edi, 2008) :

1. *Brand Differentiation*. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, tanggung jawab sosial perusahaan bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*.
2. *Human Resources*. Program tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat *interview*, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.
3. *License to operate*. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ijin menjalankan bisnis atau usaha karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian dan masyarakat luas.
4. *Risk Management*. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan . Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya “*doing right thing*” berguna dalam mengelola resiko-resiko bisnis.

2.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pada prinsip yang kelima OECD (2004) menyebutkan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pengungkapan dilakukan dengan akurat dan tepat waktu serta dibuat berdasarkan seluruh hal yang material tentang perusahaan,

termasuk situasi keuangan perusahaan, performa perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan dari perusahaan.

Prinsip OECD ini mendukung pengungkapan yang tepat waktu terhadap hal yang timbul selama periode pelaporan. Selain itu prinsip OECD ini juga mendukung secara simultan atas pelaporan informasi kepada seluruh pemegang saham dan memastikan seluruh pemegang saham tersebut mendapat perlakuan yang sama.

Fakta yang ditemukan oleh OECD (2004) dalam Farida (2012) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki pasar modal yang besar dan aktif menggunakan pengungkapan sebagai alat yang *powerful* untuk mempengaruhi perilaku perusahaan guna melindungi *investor*. Selain itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berguna untuk melindungi hak pemegang saham untuk menghindari asimetri informasi dari pihak manajemen perusahaan. Maka dari itu informasi dalam pengungkapan harus transparan dan dapat mewakili, guna memprediksi kondisi keuangan, arus kas, dan profitabilitas di masa depan.

Apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan dengan baik (tidak lengkap, transparan, relevan) maka pemegang saham akan mengalami kerugian karena pengungkapan informasi tersebut yang nantinya perusahaan juga akan mengalami kerugian berupa kehilangan investornya. Lebih jauh lagi hal tersebut akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya jika perusahaan melakukan pengungkapan yang lengkap, transparan dan relevan akan memberikan pengaruh positif baik terhadap perusahaan, pemegang saham, maupun dampak tidak langsung lainnya.

Namun, tidak semua informasi perusahaan harus diungkapkan, akan tetapi disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut. Menurut Hendriksen dan Breda (1991), terdapat tiga konsep yang umum dalam pengungkapan, yaitu :

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), merupakan pengungkapan informasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi yang sejalan dengan tujuan penyajian laporan guna mencegah kesalahan interpretasi informasi.

2. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*), merupakan pengungkapan informasi dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya mempunyai tujuan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*), merupakan pengungkapan informasi yang relevan secara keseluruhan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya kesalahan akibat informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan.

Peraturan pasar modal di berbagai negara mewajibkan perusahaan dalam pasar modal untuk melakukan pengungkapan. Namun kebijakan perusahaan yang berbeda pada tiap negara akan membuat pengungkapan menjadi beragam. Oleh sebab itu, Choi dan Meek (2008) dalam Farida (2012) membagi pengungkapan ke dalam dua tipe, yaitu:

1. *Regulatory Disclosure Requirements*

Regulatory Disclosure Requirements merupakan pengungkapan yang telah disyaratkan oleh otoritas pasar modal kepada perusahaan dalam pasar modal tersebut.

2. *Voluntary Disclosure*

Voluntary Disclosure merupakan pengungkapan secara sukarela yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Umumnya manajer mengetahui kondisi perusahaan bila dibandingkan dengan pihak eksternal. Sehingga manajemen lebih mengetahui informasi apa yang seharusnya diungkapkan kepada pihak eksternal.

Pendapat Choi dan Meek (2008) tersebut hampir serupa dengan pendapat Darrough (1993) yang membagi dua jenis pengungkapan berkaitan dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu :

1. Pengungkapan wajib (mandated disclosure), merupakan pengungkapan yang wajib dilakukan perusahaan karena telah disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara sukarela, tanpa paksaan atau tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.4 Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Pengungkapan

Pertimbangan aspek sosial ke dalam akuntansi telah dilakukan oleh Trueblood Committee (1999) dalam Fahrizqi (2010) yang menyatakan bahwa tujuan sosial perusahaan tidak kalah penting daripada tujuan ekonomi perusahaan. Trueblood Committee Report (1999) dalam Fahrizqi (2010) menyatakan :

“An objective of financial statements is to report on those activities of the enterprise affecting society which can be determined and described or measured and which are important to the role of the enterprise in its social environment”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bagian dari tujuan pelaporan keuangan.

Sejalan dengan hal itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 2009) menyebutkan bahwa:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Dari pernyataan tersebut secara implisit PSAK menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Peraturan Pemerintah No 40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No 47 pasal 6 tahun 2012, pengungkapan tanggung jawab sosial wajib dilakukan pada laporan tahunan.

Laporan tahunan pada umumnya merupakan tempat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Siregar dan Bachtiar 2010). Kent dan Chan (2003) dalam Siregar dan Bachtiar (2010) menyebutkan bahwa ada empat hal mengapa perusahaan pada umumnya mengungkapkan tanggung jawab sosial di laporan tahunan, yaitu :

1. Laporan tahunan adalah sumber utama alat komunikasi kepada investor dan secara luas digunakan perusahaan untuk pengungkapan aktivitas sosialnya.
2. Penyajian keuangan dan sosial informasi yang tergabung dalam satu dokumen dapat mengurangi biaya pengungkapan.
3. Laporan tahunan merupakan tipe informasi yang paling aktif dicari oleh pihak yang berkepentingan.
4. Pengungkapan melalui media lain seperti melalui media terkenal sangat beresiko pada interpretasi jurnalistik dan distorsi jika dibandingkan dengan pengungkapan melalui laporan tahunan yang benar-benar dikendalikan oleh manajemen.

Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya karena beberapa alasan. Terdapat tiga studi yang menjelaskan alasan perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten tersebut, yaitu Gray et al (1995) dalam Chariri dan Ghozali (2007) :

1. *Decision Usefulness*

Pendekatan Praktik Pengungkapan Sosial dan Lingkungan (PLS) menghasilkan manfaat bagi perusahaan yang melakukannya.

2. *Economic Based Theory (Positive Accounting Theory)*

Pendekatan ini didasarkan pada *Positive Accounting Theory* (PAT) yang mengutamakan maksimalisasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Maka dari itu tanggung jawab utama perusahaan adalah menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan laba Friedman (1962) dalam Chariri dan Ghozali (2007). Terdapat keterkaitan antara praktik pengungkapan tanggung jawab sosial dengan hipotesis *cost* politik dalam PAT. Pengungkapan tanggung jawab

sosial pada laporan tahunan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi biaya politis yang harus ditanggung perusahaan dalam operasinya.

3. *Political Economic Theory* (PET)

PET mempertimbangkan kerangka politik, sosial, dan institusional dimana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. PET juga mengakui pemakaian PLS dalam laporan tahunan sebagai alat strategis dalam mempengaruhi sikap pemangku kepentingan (Guthrie dan Parker (1990) dalam Chariri dan Ghozali (2007)).

Perusahaan memang sudah seharusnya melakukan tanggung jawab sosial dan pengungkapannya karena dalam pencapaian tujuan perusahaan tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan yang memperhatikan pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan lingkungan sekitar akan mendapatkan benefit, salah satunya berupa dukungan atas usaha dan keberlangsungan hidup perusahaan.

2.5 **Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)**

Pertanggungjawaban sosial merupakan suatu mekanisme bagi perusahaan secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Darwin (2004) dalam Anggraini (2006)). Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus dalam mencari keuntungan perusahaan sendiri, akan tetapi juga memperhatikan pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh sehingga tercapailah sebuah keseimbangan dalam perusahaan tersebut.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan berkelanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan itu sendiri merupakan laporan sukarela yang diterbitkan perusahaan mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukannya. Laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai pelaporan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan

keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan (GRI, 2009). Laporan keberlanjutan memuat kebijakan perusahaan mengenai ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, HAM, masyarakat, dan produk (GRI, 2009).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya bersifat sukarela sehingga banyak perusahaan yang memiliki perbedaan item dan format dalam pengungkapannya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam membandingkan aktivitas sosial yang dilakukan antar perusahaan (Siregar dan Bachtiar, 2010). Dalam menghadapi isu tersebut dibentuklah pedoman GRI pada tahun 1997 yang bertujuan sebagai pedoman pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan laporan kinerja sosial secara global. (Bhimani dan Soonawalla (2005) dalam Siregar dan Bachtiar (2010)).

Standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang umumnya digunakan di Indonesia adalah standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). IAI—KAM merujuk standar tersebut dalam pemberian penghargaan ISRA kepada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau laporan keberlanjutan. Alasan pemilihan standar pedoman pelaporan GRI karena standar ini lebih memfokuskan kepada pengungkapan aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan serta GRI merupakan acuan yang paling lazim dan umum yang digunakan dalam pembuatan pelaporan keberlanjutan di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian Chodhuri dan Chakraborty (2009) dalam Farida (2012) bahwa terdapat 800 perusahaan di 53 negara yang menggunakan pedoman GRI sebagai suatu standar dari pedoman pelaporan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan oleh sebuah organisasi.

Tahun 2000 GRI pertama kali mengeluarkan pelaporan keberlanjutan yang didalamnya terdapat prinsip pelaporan dan indikator spesifik dalam laporan keberlanjutan. Dua tahun setelahnya pedoman ini mengalami perbaikan hingga tahun 2006 dihasilkan GRI *G3 Reporting Framework* dan pembaharuan yang terakhir adalah dikeluarkannya GRI G3.1 pada bulan Maret tahun 2011 (GRI, 2011)

Organisasi atau perusahaan dapat menggunakan pedoman pelaporan GRI G3 ataupun GRI G3.1 (GRI, 2011). Kedua standar tersebut memiliki indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Pada

GRI G3.1 terdapat tambahan indikator pada *human rights, local community impacts*, dan *gender*. GRI G3 dan GRI G3.1 menyediakan suatu set pedoman yang memberikan acuan bahwa laporan keberlanjutan yang baik harus terdiri dari lima bagian yaitu: (1) *Profile*, (2) *Organizational Profile*, (3) *Report Parameters*, (4) *Governance, Commitments, and Engagement*, dan (5) *Management Approach and Performance Indicators*. Pedoman pelaporan GRI G3 dan GRI G3.1 mempunyai 3 komponen utama, yaitu :

1. Indikator kinerja ekonomi yang terdiri dari 9 item, meliputi aspek:
 - Kinerja ekonomi (4 item)
 - Kehadiran pasar (3 item)
 - Dampak ekonomi tidak langsung (2 item)
2. Indikator kinerja lingkungan yang terdiri dari 30 item, meliputi aspek :
 - Material (2 item)
 - Energi (5 item)
 - Air (3 item)
 - Biodiversitas (5 item)
 - Emisi, efluen dan limbah (10 item)
 - Produk dan Jasa (2 item)
 - Kepatuhan (1 item)
 - Pengangkutan/transportasi (1 item)
 - Menyeluruh (1 item)
3. Indikator kinerja sosial yang terdiri dari 45 item (GRI G3.1) :
 - a. Praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, terdiri dari aspek:
 - Pekerjaan (3 item)
 - Tenaga kerja/hubungan manajemen (2 item)
 - Kesehatan dan keselamatan jabatan (4 item)
 - Pelatihan dan pendidikan (3 item)
 - Keberagaman dan kesempatan setara (2 item)
 - Persamaan gaji untuk wanita dan pria (1 item hanya untuk GRI G3.1)

- b. Hak asasi manusia, terdiri dari aspek:
- Praktek investasi dan pengadaan (3 item)
 - Nondiskriminasi (1 item)
 - Kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul (1 item)
 - Pekerja anak (1 item)
 - Kerja paksa dan kerja wajib (1 item)
 - Praktek/tindakan pengamanan (1 item)
 - Hak penduduk asli (1 item)
 - Penilaian (1 item hanya untuk GRI G3.1)
 - Remediation (1 item hanya untuk GRI G3.1)
- c. Masyarakat, terdiri dari aspek:
- Komunitas lokal (3 item pada GRI G3.1, 1 item pada GRI G3)
 - Korupsi (3 item)
 - Kebijakan publik (2 item)
 - Kelakuan tidak bersaing (1 item)
 - Kepatuhan (1 item)
- d. Tanggung jawab produk, terdiri dari aspek:
- Kesehatan dan keamanan pelanggan (2 item)
 - Pemasangan label bagi produk dan jasa (3 item)
 - Komunikasi pemasaran (2 item)
 - Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan (1 item)
 - Kepatuhan (1 item)

Perbedaan GRI G3 dan GRI G3.1 terletak pada penambahan 5 item pada indikator sosial. Pada penelitian ini akan menggunakan GRI G3.

2.6 Struktur Kepemilikan

2.6.1 Struktur Kepemilikan di Berbagai Negara

Keberagaman budaya, pola pikir, dan sejarah dalam suatu negara merupakan salah satu faktor yang membentuk struktur kepemilikan di suatu negara. Struktur

kepemilikan di Indonesia berbeda dengan struktur kepemilikan di Amerika dan Eropa. Berikut struktur kepemilikan di Amerika, Inggris, Continental Europe, dan Asia :

1. Struktur Kepemilikan di Amerika (La Porta et al ,1999) :
 - Struktur kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*)
 - Bersifat individualis
 - Penyebaran kepemilikan saham menyebabkan rendahnya pengawasan perusahaan oleh pemegang saham.
 - Berorientasi kepada pasar keuangan
2. Struktur Kepemilikan di Inggris (La Porta et al ,1999) :
 - Struktur kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*)
 - Kepemilikan oleh institusi keuangan semakin meningkat
 - Meningkatnya kepemilikan institusional menyebabkan pemegang saham tidak terlalu terfragmen.
 - Pemecahan kepemilikan terkonsentrasi bertujuan untuk melakukan pemerataan kepemilikan yang adil.
3. Struktur Kepemilikan di Continental Europe (La Porta et al ,1999) :
 - Struktur kepemilikan terkonsentrasi
 - Struktur kepemilikan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang bersama-sama memiliki kontrol atas perusahaan.
 - Memfasilitasi peningkatan cross-border merger dan akuisisi untuk meningkatkan daya saing Eropa
 - Pasar saham aktif
4. Struktur Kepemilikan di Asia (Claessens, 2002) :
 - Dominasi kepemilikan keluarga
 - Struktur kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu (keluarga)
 - Dominasi dari kepemilikan keluarga membuat rendahnya tingkat terjadinya asimetri informasi.

- Kepemilikan institusional merupakan pihak minoritas dalam kepemilikan saham perusahaan.
5. Struktur Kepemilikan di Indonesia (Claessens, 2000) :
- Kepemilikan terkonsentrasi
 - Dominasi kontrol keluarga atas perusahaan
 - Peraturan perlindungan pemegang saham yang minim karena dominasi kepemilikan keluarga (La Porta et al, 1999)
 - Tidak banyak kepemilikan publik pada perusahaan.

2.6.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Menurut Jansen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata lain kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan presentase kepemilikan institusional dapat menurunkan presentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring (Suranta dan Machfoedz 2003).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Barnea dan Rubin (2005) bahwa *institutional shareholders*, dengan

kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Begitu pula penelitian Wening (2009), semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional tidak dimasukkan karena terjadinya multikolinearitas yang mengharuskan untuk menghilangkan salah satu variabel. Keputusan menghilangkan variabel ini dikarenakan tingkat pengaruh kepemilikan institusional lebih rendah dari variabel lainnya.

2.6.3 Kepemilikan Manajerial

Ada berbagai kebijakan yang dapat diterapkan oleh para pemegang saham dalam mengatur distribusi modalnya atau kebijakan dalam membentuk struktur kepemilikan perusahaan yang mereka miliki. Ada sebagian perusahaan yang mengambil kebijakan kompensasi perusahaan bagi para manajernya dengan cara memberikan hak kepada para manajer untuk memiliki sebagian saham perusahaan (Ratnaningsih dan Hartono, 2001). Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider Ownership* ini didefinisikan sebagai presentase suara yang berkaitan dengan saham dan pilihan yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004). Kepemilikan manajer (*insider ownership*) tersebut dapat menyebabkan munculnya *benefit* maupun *cost* bagi perusahaan, karena *insider ownership* tersebut kemudian memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen (Jensen, 1992).

Pengertian kepemilikan manajerial itu sendiri adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktifitas perusahaan.

Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya. Kepemilikan manajerial yang tinggi berakibat pada rendahnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap nilai investasi dimasa yang akan datang bersumber dari biaya internal (Tamba 2009).

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial tidak diikutsertakan karena perusahaan dengan kepemilikan manajerial pada perusahaan *go public* di Indonesia masih sangat sedikit.

2.6.4 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah menunjukkan adanya keterkaitan atau hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah seringkali mempunyai perhatian khusus terkait tujuan politik diluar tujuan pencapaian profit, misalnya harga output yang rendah ataupun dampak eksternal lain (Thomson dan Pederson, 2000). Tujuan tersebut berupa perhatian khusus terhadap aspek kesejahteraan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai dampak dari kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan pemerintah (BUMN) mungkin lebih lemah jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. (Mark dan Li 2000, dalam Siagian 2011).

Kepemilikan pemerintah mempunyai arti khusus bahwa pemiliknya (pemerintah) tidak dapat mengontrol perusahaan secara langsung. Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk seperti menteri. Pada perusahaan swasta, tujuan pemilik perusahaan (pemegang saham) adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Para pemegang saham akan melakukan berbagai cara untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah (Badan Usaha Milik Negara), memiliki tujuan yang sangat luas, meliputi tujuan sosial, *agent of development* serta bisnis. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, terdapat potensi konflik kepentingan yang besar di dalam BUMN. Dalam perkembangannya, BUMN melakukan privatisasi dengan menjual

sahamnya ke pihak swasta atau publik (PP No 33 tahun 2005). Dengan privatisasi, BUMN akan lebih fokus pada pencapaian profit sehingga muncul motivasi lebih untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap perusahaan dengan kepemilikan pemerintah daripada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan pada perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Siagian, 2011).

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang menjadi perusahaan terbuka atau terdaftar di BEI umumnya telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan.

2.6.5 Kepemilikan Asing

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan. Investor asing cenderung akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang melakukan tata kelola perusahaan yang baik karena keefektifan tata kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011). Dengan demikian perusahaan dengan kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008).

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dengan kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing (Susanto (2006) dalam Pian PK (2010)) sebagai berikut :

1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin punya sebuah sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.

3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

2.6.6 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh publik pada tiap lembar sahamnya (Badjuri, 2011). Dengan demikian perusahaan publik menandakan tersebarnya kepemilikan perusahaan tersebut pada publik. Marston dan Polei (2004) dalam Prabowo dan Tombotoh (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan yang lebih tersebar berpotensi memicu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini dikarenakan lebih banyak pemegang saham dengan kekuatan yang terbatas untuk mengakses informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial.

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (going concern) sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat. (Badjuri 2011).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk menghindari benturan kepentingan antar pemegang saham. Untuk menjaga akuntabilitasnya, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (KNKG, 2006). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar lebih cenderung memberikan pengungkapan tambahan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pengguna laporan keuangan bukan hanya pihak internal perusahaan tetapi juga publik. Selain itu, perusahaan juga harus menjamin bahwa masing-masing pemegang saham harus mendapat perlakuan yang sama (OECD Principles III, 2004).

2.7 Jenis Industri

2.7.1 *High Profile Industry*

Robert&Beliveau (1994); Lerner&Fryxell (1988) dalam Jones (1999) menyatakan bahwa industri berdasarkan sensitivitasnya terhadap kerusakan lingkungan dan tanggung jawab sosialnya dapat dikategorikan dalam kategori *high profile* dan *low profile*. Kategori *high profile* dikarakteristikan sebagai industri yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan sehingga dituntut memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi pula. Hal tersebut disebabkan oleh operasi perusahaan yang banyak memodifikasi lingkungan dan melibatkan pemangku kepentingan yang kompleks.

Roberts (1992) mendefinisikan industri yang termasuk dalam *high profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi.

Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat. Begitu pula dengan perusahaan *high profile* juga lebih sensitif terhadap keinginan konsumen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap produknya. Adapun menurut Zuhroh dan Sukmawati (2003) yang tergolong dalam perusahaan *high profile* adalah perusahaan yang mempunyai sifat : memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya mengeluarkan residu. Contoh perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, serta transportasi dan pariwisata.

2.7.2 *Low Profile Industry*

Robert&Beliveau (1994); Lerner&Fryxell (1988) dalam Jones (1999) menyatakan bahwa kategori *low profile* dikarakteristikan sebagai industri yang kurang sensitif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan sehingga tidak dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi seperti halnya industri *high profile*

Perusahaan industri *low profile* tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat manakala operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu pada atau hasil produksinya karena masih dapat ditoleransi oleh masyarakat luas. Adapun menurut Zuhroh dan Sukmawati (2003) yang tergolong dalam perusahaan *low profile* antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, *property*, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

2.8 Ukuran (Size) Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan besar mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada jumlah aktiva, jumlah tenaga kerja, volume penjualan, dan kapitalisasi pasar (Adiaksa (2007) dalam Dyah (2009)). Perusahaan besar mengeluarkan biaya produksi yang besar, aktivitas yang lebih padat, dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan proporsi pemegang saham yang besar yang kemungkinan besar memiliki kepentingan sendiri dengan program sosial perusahaan daripada perusahaan sedang ataupun perusahaan kecil, sehingga menyebabkan tekanan politis yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya kepada publik.

2.9 Profitabilitas Perusahaan

Ada anggapan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi perusahaan tidak perlu mengungkapkan informasi tentang darimana laba tersebut didapat dan bagaimana laba tersebut akan dikelola. Ini berarti salah satu yang menandakan semakin tinggi tingkat profitabilitas, akan semakin rendah pengungkapan sosial perusahaan. Untuk membuktikan hal tersebut dilakukanlah penelitian dengan hasil

yang beragam. Terdapat penelitian yang menghasilkan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ada juga yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Ada 6 pengukuran profitabilitas, yaitu dengan : *gross profit margin*, *operating profit*, *net profit margin*, *return on asset*, dan *return on equity*. (Samsul 2006).

2.10 *Leverage* Perusahaan

Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetapi dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya. Sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Alasan yang kuat menggunakan beban tetap adalah untuk meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham. *Leverage* juga merupakan sarana untuk mendorong peningkatan keuntungan atau pengembalian/hasil nilai tanpa menambah investasi (Van Horn, 1997).

Agency theory memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Tambahan informasi biasanya diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi akan dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur (Belkaoui dan Karpik 1989).

2.11 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, yang di spesifikasikan menjadi kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan jenis industri (*high profile industry* dan *low profile industry*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan perbandingan hasil yang didapat dari laporan tahunan perusahaan dengan gabungan laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan (hanya bagi

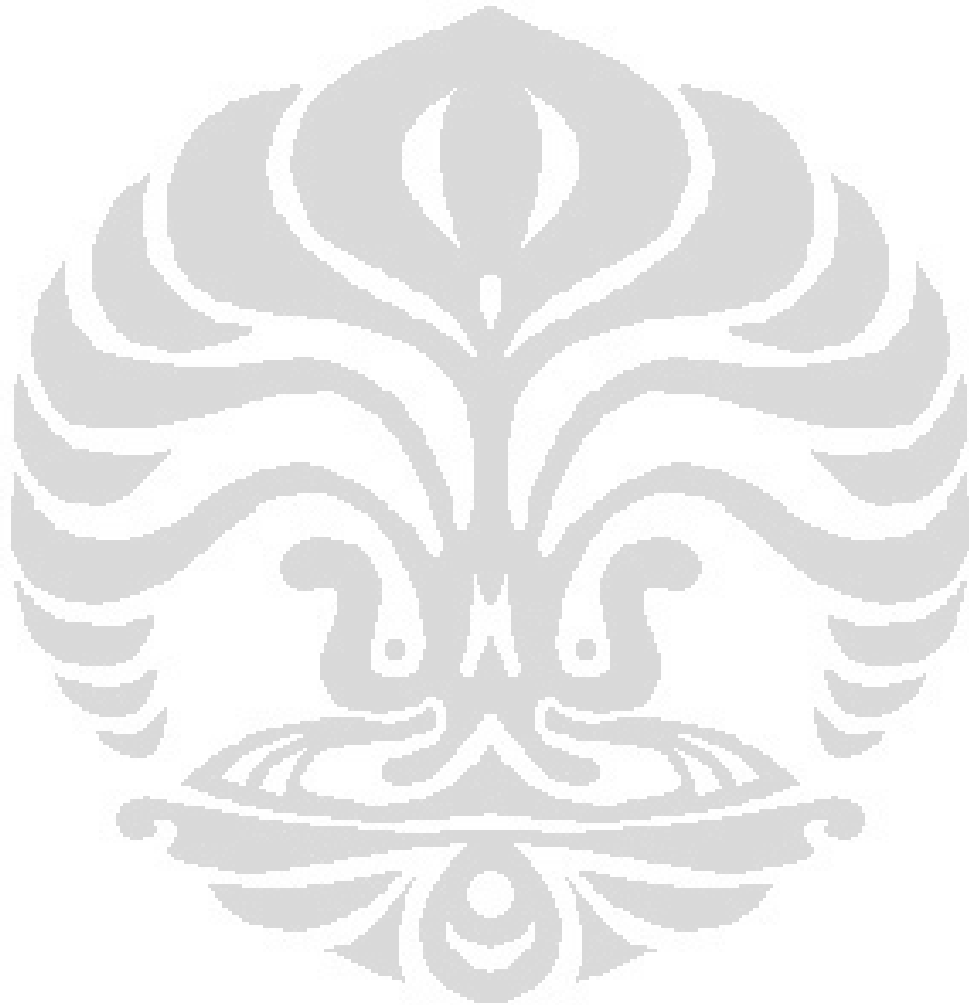
perusahaan yang menerbitkan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen pengungkapan tanggung jawab sosial dijelaskan sebagai berikut :

1. Sembiring (2005) menggunakan variabel independen : ukuran perusahaan, profitabilitas, profile perusahaan, ukuran dewan komisaris, *leverage*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profile perusahaan, dan ukuran dewan komisaris saja yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Anggraini (2006) dengan menggunakan variabel presentase kepemilikan manajemen, tingkat *leverage*, biaya politis (ukuran perusahaan dan jenis industri), dan profitabilitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya kepemilikan manajemen dan tipe industri yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial.
3. Machmud, dan Djakman (2008) menggunakan variabel independen : kepemilikan asing dan kepemilikan institusi, variabel kontrol : tipe industri ukuran perusahaan, kategori BUMN dan Non BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusi tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Siregar dan Bachtiar (2010) meneliti pengaruh *board size*, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh pada tanggung jawab sosial perusahaan.

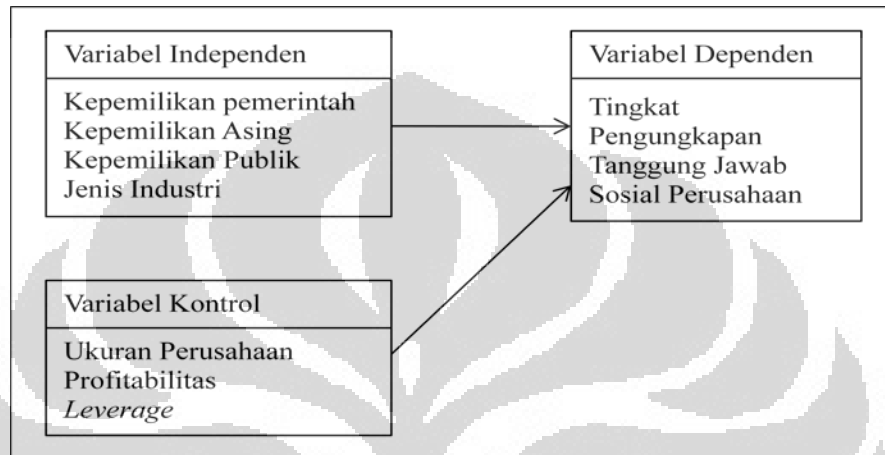
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menambahkan kepemilikan publik, dan jenis industri sebagai variabel independennya, serta ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel kontrolnya. Penelitian ini mengecualikan jenis industri keuangan dan perbankan karena pada industri perbankan dan keuangan bersifat *high regulated* dan pemangku

kepentingan umumnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

3.2 Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Struktur Kepemilikan

a. Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab untuk melindungi publik dan memastikan bahwa organisasi atau perusahaan mengimplementasikan tata kelola perusahaan sebagai proteksi terhadap pemangku kepentingannya (Siagian, 2011). Pemerintah mempunyai kekayaan tersendiri yang akan menguntungkan perusahaan yang memiliki proporsi saham kepemilikan pemerintah. Keuntungan tersebut dapat berupa kemudahan dalam modal, kredit, maupun likuidasi, akan tetapi perusahaan tersebut harus menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pemerintah tersebut.

Penelitian Siagian (2011) pada perusahaan di Indonesia memberikan hasil bahwa kepemilikan pemerintah terasosiasi positif dengan implementasi tata kelola perusahaan. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintahan

Indonesia konsisten dengan usahanya mengembangkan tata kelola perusahaan dalam perusahaan kepemilikannya sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan tersebut berpengaruh pada pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

b. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah yang berasal dari investor asing/berstatus luar negeri. Perusahaan yang proporsi kepemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh asing biasanya lebih terkendala dalam hal geografis dan bahasa. Oleh sebab itu, perusahaan dengan sebagian besar kepemilikan asing akan lebih terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas (Xiao et al, 2004).

Menurut Hendriksen dan Breda (1991) menyatakan bahwa semakin besar kepercayaan perusahaan terhadap sumber dari internasional, perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan keuangan menjadi lebih sesuai untuk pasar keuangan dimana perusahaan dapat memperoleh modal. Oleh karena pihak asing dianggap memiliki perhatian yang lebih terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan akan lebih mendapat dukungan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

c. Kepemilikan Publik

Menurut Badjuri (2011) dalam lingkup eksternal, perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan

(deviden) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (going concern) sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Bagi internal perusahaan, kepemilikan publik dapat berfungsi untuk mengawasi atau memonitor manajemen dan sebagai *voting power* atas keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham minoritas. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

3.2.2 Jenis Industri

Jenis industri dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu industri *high profile* dengan industri *low profile*. Industri *high profile* merupakan industri yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap kerusakan lingkungan sehingga timbul tuntutan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Sedangkan industri *low profile* merupakan industri yang memiliki tingkat kesensitifitasan yang rendah terhadap kerusakannya sehingga tidak menimbulkan tuntutan yang besar terhadap tanggung jawab sosialnya (Robert&Beliveau (1994); Lerner&Fryxell (1988) (dalam Jones, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Dilling (2009) menemukan bahwa *high profile sectors* akan lebih melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dengan media peliputan yang lebih tinggi. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan *industry high sector* melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya dengan hipotesis yang diajukan :

H4 : Jenis industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. Sehingga diperlukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dengan cara mengukur variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*) pada laporan tahunan serta gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI). Penilaian dilakukan dengan membandingkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang dinyatakan dalam GRI G.3.1 sebanyak 34 item aspek dari total keseluruhan indikator pengungkapan. Jika terdapat informasi yang sesuai atau termasuk salah satu indikator GRI maka diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan maka diberi skor 0. Perhitungan CSDI dirumuskan dengan :

$$CSDi = \frac{\text{Jumlah Item yang diungkapkan}}{34}$$

Pengukuran indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan metode *content analysis* yaitu metode pengkodifikasian teks dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam berbagai kelompok atau kategori berdasar pada kinerja yang ditentukan (Weber 1998, dalam Waryanto 2010).

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini hanya menghitung sebanyak satu kali untuk tiap item pada laporan tahunan.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan dan jenis industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri yang dibagi menjadi industri *high profile*, dan industri *low profie* yang terdapat pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010.

3.3.2.1 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham pemerintah yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini menggunakan presentase rasio kepemilikan pemerintah.

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jumlah saham pihak pemerintah yang digunakan adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pemerintah pada akhir tahun. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun

3.3.2.2 Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang

beredar. Kepemilikan saham asing dalam penelitian ini menggunakan presentase rasio kepemilikan saham asing.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jumlah saham asing yang digunakan adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh asing pada akhir tahun. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

3.3.2.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik domestik dalam bentuk perorangan, bukan bagian dari manajerial terhadap keseluruhan saham individu atau lembaga beredar yang diterbitkan oleh perusahaan. Kepemilikan publik dalam penelitian ini menggunakan presentase rasio kepemilikan publik.

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh publik}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jumlah saham publik yang digunakan adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh individu atau publik domestik pada akhir tahun. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

3.3.2.4 Jenis Industri

Perusahaan yang tergolong dalam *high profile* mempunyai sifat : memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dalam produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi udara. Perusahaan dengan tipe ini memiliki tingkat kesensitifan yang lebih tinggi karena kelalaian perusahaan dalam

pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri ini antara lain perusahaan perminyakan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi listrik, *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata.

Perusahaan low profile adalah perusahaan yang tidak terlalu mendapat sorotan luas dari masyarakat manakala operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri ini antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok peralatan medis, *property*, *retailer*, tekstil dan produksi tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

Variabel jenis industri dalam penelitian ini menggunakan dummy 1;0 . Jenis industri *high profile* akan diberi nilai 1 dan jenis industri *low profile* akan diberi nilai 0.

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variable yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan. Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Anggraini (2006), Macmud dan Djakman (2008), dan Puspitasari (2009) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang lebih besar akan mendapat sorotan yang lebih banyak dari masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 yang berjumlah 360 perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan tahun 2010 untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Populasi perusahaan diambil dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan di tahun 2010. Adapun kriteria populasi yang akan digunakan yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 (kecuali jenis industri keuangan dan perbankan).
2. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan lengkap pada tahun 2010.
3. Data perusahaan yang dibutuhkan tersedia.

Populasi yang digunakan adalah semua jenis industri perusahaan kecuali jenis industri perusahaan *finance* karena industri tersebut mempunyai peraturan tersendiri atau *high regulated* dan memiliki format yang berbeda dari jenis industri lainnya.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2010 perusahaan sampel. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan :

1. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya.
2. Data yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan telah digunakan dalam berbagai penelitian, baik penelitian didalam negeri maupun luar negeri.
3. Data laporan tahunan yang tersedia di BEI memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena telah diaudit oleh auditor independen.

Laporan tahunan perusahaan yang dijadikan obyek adalah laporan

tahunan perusahaan tahun 2010 karena data tersebut adalah data terbaru pada saat dilakukan penelitian karena tahun 2011 belum terdapat data lengkap seluruh perusahaan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan pada periode tahun 2010 di website BEI (www.idx.co.id) dan melakukan pencarian pada website google untuk mencari laporan keberlanjutan perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sebagai populasi dalam penelitian ini.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini mengolah data kemudian menganalisis data tersebut dengan pengujian sebagai berikut :

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian dengan menggunakan rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum pada data.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan program SPSS.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam uji normalitas data dilakukan pengujian statistik non parametik Kolmogorov-Sminov (K-

S), analisis grafik histogram dan P-plot. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data mengikuti arah garis diagonal dan data menyebar disekitar garis diagonal. Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika data tidak mengikuti arah garis diagonal dan data menyebar jauh dari garis diagonal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) dan *tolerance* pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Terdapat beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya Uji Spearman's rho, Uji Gleasjer, Uji Park dan Uji *Scatter Plot* (melihat pola grafik regresi). Pada penelitian ini uji statistik yang akan digunakan adalah:

1. Uji *Scatter Plot*

Jika tidak terdapat pola jelas seperti titik-titik yang menandakan komponen-komponen variabel-variabel menyebar secara acak pada bidang *scatter* maka dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji *Park*

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila hasilnya kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada populasi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Peneliti menguji hipotesis dengan melakukan uji pengaruh simultan, uji parsial, dan uji koefisien determinasi

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan variabel-variabel independen. Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut:

$$CSDi = \beta_0 + \beta_1 KEPPM + \beta_2 KEPSING + \beta_3 KEPPUB + \beta_4 INDSTR + \beta_5 SIZE + \beta_6 PROFIT + \beta_7 LEVERAGE + e$$

Keterangan :

- CSDi : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan i
- KEPPM : Kepemilikan Pemerintah
- KEPSING : Kepemilikan Asing
- KEPPUB : Kepemilikan Publik
- INDSTR : Jenis Industri
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- PROFIT : Profitabilitas Perusahaan

- *LEVERAGE* : *Leverage* Perusahaan
- *e* : *error*
- *I* : 1,2,...,N

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

3.7.5 Uji Pengaruh Simultan (F tes)

Pengujian dilakukan untuk menguji signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,005 ($\alpha=5\%$) dengan kriteria :

1. Bila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel berarti variabel struktur kepemilikan dan jenis industri secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bila F hitung lebih besar dari F tabel berarti variabel struktur kepemilikan dan jenis industri secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3.7.6 Uji Parsial (t tes)

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,005 ($\alpha=5\%$). Hipotesis yang dibangun adalah :

Ho = Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H1 = Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Koefisien variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari probabilitas t statistiknya. Apabila probabilitas t statistik $> p\text{-value}$ maka terima Ho, sebaliknya jika probabilitas t statistiknya $< \alpha$ maka tolak Ho.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi data yang berasal dari dari pengumpulan data pada populasi perusahaan *non finance* yang terdaftar di BEI tahun 2010. Data dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu secara konsisten menggunakan data laporan tahunan tahun 2010 dan menggunakan data laporan keberlanjutan apabila perusahaan menerbitkan laporan tersebut. Data tersebut meliputi deskripsi populasi dan pengujian asumsi klasik. Uraian pembahasan hasil penelitian mengungkapkan pembahasan atas hasil pengujian hipotesis.

Tabel 4. Deskripsi Data Penelitian.

Keterangan	Jumlah data laporan tahunan	Jumlah data laporan keberlanjutan
Data perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	360	25
Data perusahaan yang tidak dapat diolah	77	11
Data perusahaan yang dapat diolah	283	14

Sumber : data sekunder yang diolah 2010

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan GRI G3 yang memiliki 81 item pengungkapan. Dalam penelitian ini hanya membagi pengungkapan tersebut ke dalam 34 aspek-aspek dari indikatornya karena aspek-aspek tersebut merupakan sub-bagian dari indikator dari GRI dan aspek-aspek tersebut dianggap sudah bisa mewakili item-item pengungkapan yang terdapat pada tiap aspek tersebut.

Tabel 4.1.1A. Item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Indikator	Jumlah Aspek
Kinerja ekonomi	3
Kinerja lingkungan	9
Tenaga kerja dan pekerjaan yang layak	5
Hak asasi manusia	7
Masyarakat	5
Tanggung jawab produk	5
Jumlah	34

Sumber : data sekunder yang diolah 2010

Jenis industri *non*-keuangan yang terdaftar di BEI terdiri atas 8 jenis industri.

Populasi yang digunakan :

Tabel 4.1.1B. Jumlah Perusahaan Dalam Tiap Industri.

Jensi Industri	Jumlah populasi yang digunakan
Agriculture	13
Mining	23
Basic Industry and Chemicals	41
Miscellaneous Industry	28
Consumer Goods	27
Property, Real Estate and Building Construction	43
Infrastructure, Utilities and Transportation	25
Trade, Service, and Investment	83
Total	283

Sumber : data sekunder yang diolah 2010

4.1.2 Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah dapat mempunyai kepemilikan atas suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang mempunyai kepemilikan pemerintah adalah perusahaan BUMN atau perusahaan negara lainnya. Data mengenai rincian kepemilikan pemerintah dalam populasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2. Jumlah rincian kepemilikan pemerintah.

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Kepemilikan Pemerintah <30%	270
Kepemilikan 30%-50%	0
Kepemilikan Pemerintah >50%	13

Populasi perusahaan dalam penelitian ini hanya terdapat 13 perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah diatas 50% dari keseluruhan kepemilikannya. Dua kepemilikan pemerintah yang terbesar terdapat pada jenis industri *consumer goods* spesifikasi *pharmaceuticals* yaitu PT Kimia Farma Tbk dengan kepemilikan sebesar 90,03% dan PT Indofarma Tbk sebesar 80,66%. Setelah itu kepemilikan pemerintah terbesar terdapat pada industri *mining* dan infrastruktur serta telekomunikasi.

4.1.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang berasal dari investor asing atau luar negeri. Kepemilikan asing dalam penelitian ini meliputi perusahaan asing dan publik asing. Berikut adalah rincian mengenai kepemilikan asing dalam populasi :

Tabel 4.1.3. Jumlah rincian kepemilikan asing.

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Kepemilikan Asing <30%	170
Kepemilikan Asing 30%-50%	45
Kepemilikan Asing >50%	68

Sebagian besar perusahaan dalam populasi penelitian ini memiliki kepemilikan asing berada pada range 0%-30%. Kepemilikan asing terbesar yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari asia yaitu PT Kokoh Inti Arebama Tbk memiliki kepemilikan asing sebesar 99,09% yang berasal dari Bangkok dan PT Matahari Department Store yang memiliki kepemilikan asing sebesar 98,15% yang berasal dari Asia Color Company Limited. Kepemilikan asing yang berasal dari asia masih mendominasi kepemilikan asing perusahaan di Indonesia.

4.1.4 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang bukan merupakan bagian dari manajemen atau asing. Rincian mengenai kepemilikan publik dalam populasi adalah :

Tabel 4.1.4. Jumlah rincian kepemilikan publik.

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Kepemilikan Publik <30%	152
Kepemilikan Publik 30%-50%	48
Kepemilikan Publik >50%	83

Sebagian besar perusahaan dalam populasi ini memiliki kepemilikan publik kurang dari 30%. Kepemilikan publik pada perusahaan umumnya merupakan kepemilikan publik perorangan.

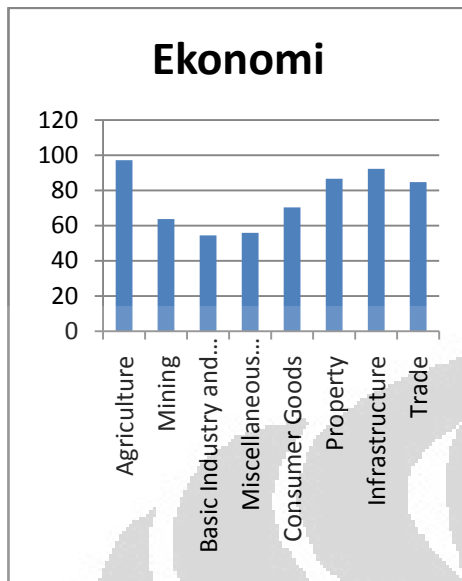
4.1.5 Jenis industri

Jenis industri yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini dibagi menjadi industri *high profile* dan industri *low profile*. Industri *high profile* merupakan industri yang memiliki dampak sensitifitas yang tinggi terhadap lingkungannya, yaitu industri *mining, agriculture, basic industry and chemicals*, dan *infrastructure, utilities, and transportation*. Sedangak industri *low profile* cenderung memiliki

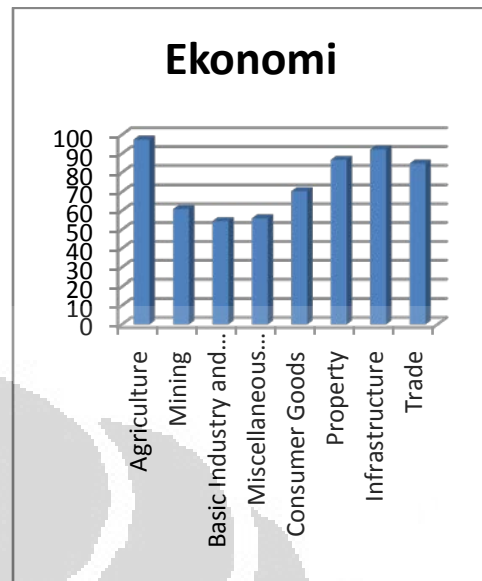
sensitifitas yang rendah, yaitu industri *consumer goods*, *miscellaneous industry*, *property, real estate and building construction*, dan *trade, service and investment*.

Indikator ekonomi dalam GRI dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Gambar 4.1.5A menjelaskan mengenai indikator ekonomi pada tiap industri dimana pengungkapan indikator ekonomi tertinggi ada pada industri *agriculture* dan indikator ekonomi terendah ada pada industri *basic industry and chemicals*. Hal ini menandakan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan, implikasi keuangan atas resiko atau kesempatan terhadap aktivitas perusahaan karena perubahan iklim, serta hal yang berhubungan dengan tunjangan manfaat karyawan pada industri *agriculture* lebih memiliki pengaruh daripada industri lainnya. Khususnya ketergantungan pada perubahan iklim menjadi hal yang sangat penting dalam industri ini.

Terlihat pada gambar 4.1.5B bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan dari pengungkapan indikator pada laporan tahunan maupun gabungan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari jenis industri perusahaan. Hanya nilai pengungkapan pada tiap-tiap jenis industri menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengungkapan dari laporan tahunan karena perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan pasti melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan pada laporan tahunan tidak semua perusahaan melakukan hal itu. Hal ini dapat dilihat dari aspek dampak ekonomi tidak langsung pada indikator kinerja ekonomi.

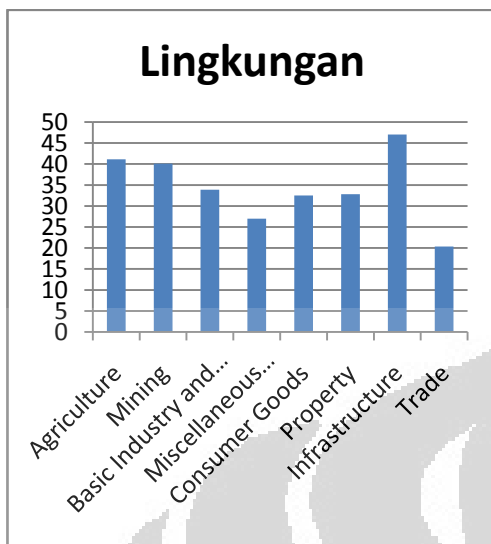


Gambar 4.1.5A. Indikator Ekonomi Dalam Presentase (Laporan tahunan).

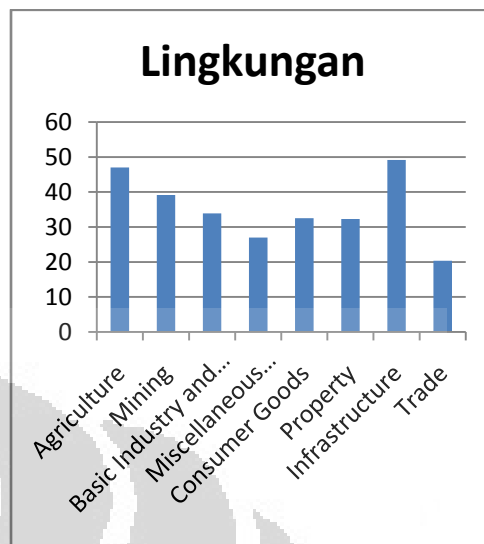


Gambar 4.1.5B. Indikator Ekonomi Dalam Presentase (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan).

Gambar 4.1.5C dan gambar 4.1.5D menjelaskan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur, *utilities* dan transportasi serta perusahaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam mengungkapkan indikator lingkungan lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan aktivitas perusahaan pada jenis industri tersebut memberikan banyak dampak langsung terhadap lingkungan. Indikator lingkungan yang diungkapkan terdiri dari 9 aspek, yaitu aspek material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, pengangkutan / transportasi, serta aspek keseluruhan.



Gambar 4.1.5C. Indikator Lingkungan Dalam Presentase (Laporan tahunan).

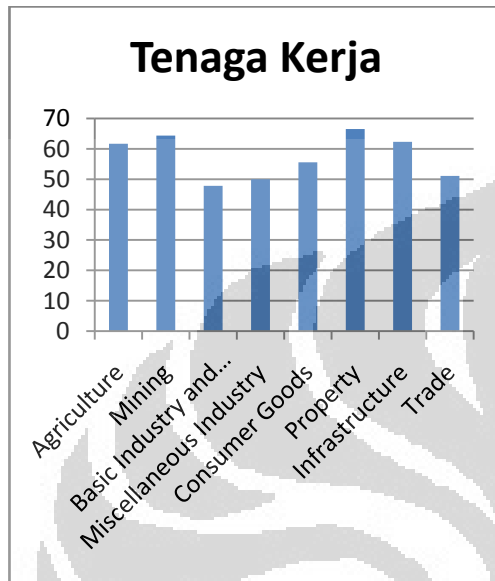


Gambar 4.1.5D. Indikator Lingkungan Dalam Presentase (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan)

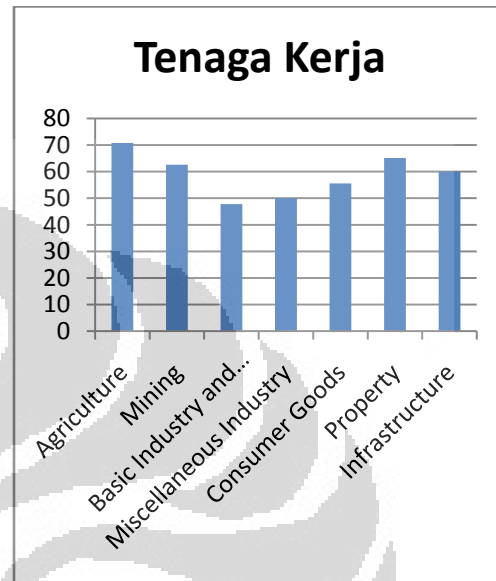
Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, pengembangan potensi melalui pelatihan, keselamatan dalam bekerja, kesetaraan dan keadilan, serta manfaat yang diterima karyawan. Aspek-aspek tersebut terkandung dalam indikator tenaga kerja dan pekerjaan yang layak dalam indeks pengungkapan GRI ini. Aspek pengembangan dan pelatihan serta manfaat yang diterima karyawan adalah aspek yang paling banyak diungkapkan perusahaan dalam indikator ini.

Pada gambar 4.1.5E dan gambar 4.1.5F menandakan adanya perbedaan hasil pada indikator pengungkapan tenaga kerja antara pengungkapan yang berasal dari laporan tahunan saja dengan pengungkapan yang menggabungkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Industri *property* memiliki pengungkapan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan industri lainnya pada pengungkapan laporan tahunan saja. Sedangkan industri *agriculture* pada pengungkapan yang berasal dari gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan lebih tinggi dari industri lainnya karena dalam industri *agriculture* terdapat 3 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan pengungkapan penuh pada indikator tenaga kerja dan pekerjaan

yang layak yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk, PT BW Plantation Tbk, dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.



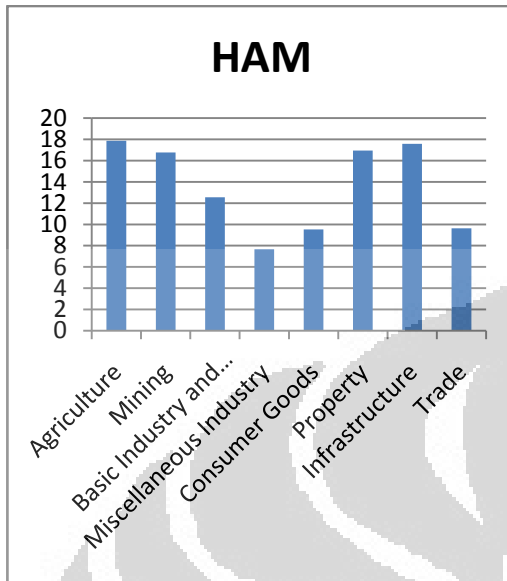
Gambar 4.1.5E. Indikator Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak Dalam Presentase (Laporan tahunan)



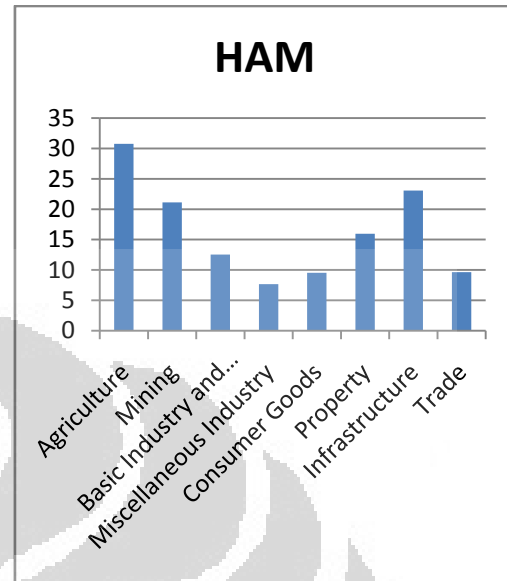
Gambar 4.1.5F. Indikator Tenaga Kerja dan pekerjaan yang Layak (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan).

Aspek praktek investasi dan pengadaan, nondiskriminasi, kebebasan berserikat, pekerja anak, kerja paksa dan kerja wajib, praktik/tindakan pengamanan, serta hak penduduk asli terkandung dalam indikator hak asasi manusia. Gambar 4.15G dan gambar 4.1.5H menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan hak asasi manusia dalam perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia belum terlalu memperhatikan aspek hak asasi manusia dibanding dengan indikator lainnya. Hasil ini menunjukkan salah satu perbedaan antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan di Eropa atau perusahaan di Amerika yang memiliki perhatian yang baik terhadap hak asasi manusia.

Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari pengungkapan dalam seluruh laporan tahunan dibandingkan dengan pengungkapan gabungan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Indikator hak asasi manusia masih menjadi indikator terendah dengan pencapaian kurang dari 35%.



Gambar 4.1.5G. Indikator Hak Asasi Manusia Dalam Presentase (Laporan tahunan)



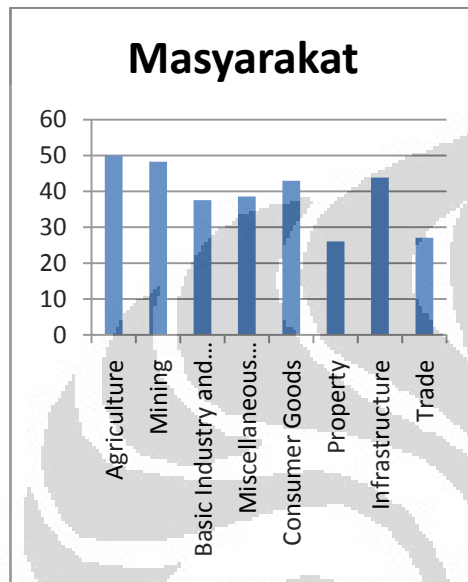
Gambar 4.1.5H Indikator Hak Asasi Manusia Dalam Presentase (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan)

Aspek *community* menjadi aspek yang paling banyak diungkapkan dibandingkan aspek korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing, dan kepatuhan dalam pengungkapan indikator masyarakat. Walaupun Indonesia sedang mengalami masalah serius dalam hal korupsi, akan tetapi pengungkapan aspek korupsi masih sangat rendah dibandingkan aspek lainnya. Hanya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan saja yang mendominasi pengungkapan aspek korupsi ini.

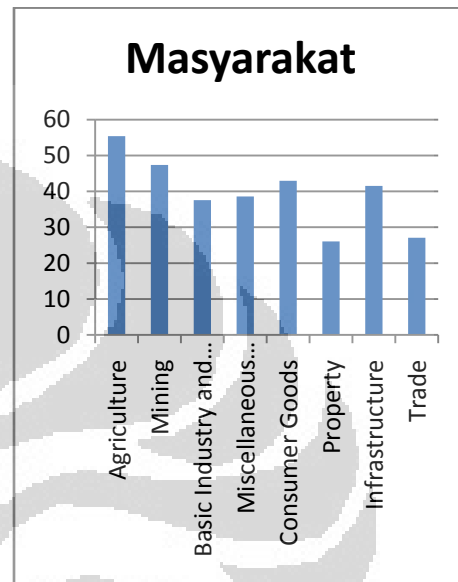
Bencana alam yang terjadi pada tahun 2010 yaitu bencana alam Wasior, Mentawai, dan Merapi umumnya menjadi fokus utama perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sosialnya yang terkandung dalam indikator masyarakat. Selain itu bidang pendidikan juga menjadi kegiatan sosial yang paling sering dilakukan perusahaan karena belum meratanya tingkat pendidikan serta mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

Pada gambar 4.1.5I dan gambar 4.1.5J tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pengungkapan indikator masyarakat. Perusahaan yang tergolong

high profile industry memiliki pengungkapan yang lebih tinggi daripada pada perusahaan *low profile industry* karena dampak yang signifikan terhadap lingkungan membuat perusahaan *high profile* harus lebih memperhatikan aspek sosial.



Gambar 4.1.5I. Indikator Masyarakat Dalam Presentase (Laporan tahunan)

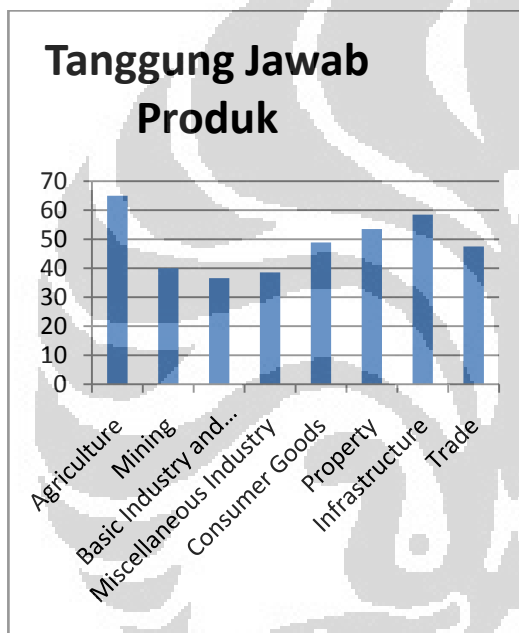


Gambar 4.1.5J. Indikator Masyarakat Dalam Presentase (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan)

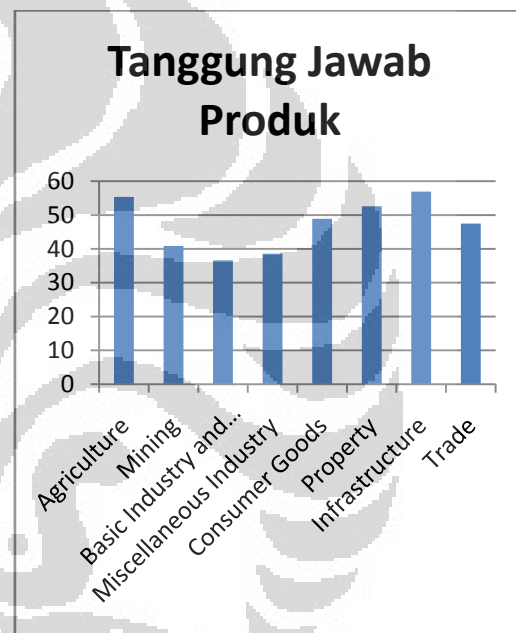
Indikator kinerja tanggung jawab produk membahas aspek produk dan atau jasa dari perusahaan yang diberikan yang dapat memberikan pengaruh kepada pelanggan, terutama kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, serta pemasaran dan kode etik atau privasi. Pada umumnya semua perusahaan melakukan pengungkapan dalam indikator tanggung jawab produk, namun perusahaan dalam bidang *agriculture* melakukan pengungkapan yang lebih tinggi daripada perusahaan bidang lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan *agriculture* hanya memiliki sedikit populasi dan sebagian besar populasi tersebut melakukan pengungkapan pada indikator tanggung jawab produk.

Perbedaan yang dihasilkan dari pengungkapan yang didapat hanya dari laporan tahunan saja dengan yang didapat dari gabungan antara laporan tahunan dan laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa item pengungkapan dalam laporan

tahunan saja lebih tinggi dibandingkan dengan item pengungkapan dari gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (dapat dilihat pada gambar 4.1.5K dan gambar 4.1.5L). Hasil ini disebabkan oleh indikator yang diungkapkan dalam laporan tahunan tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan serta dalam laporan keberlanjutan pengungkapan sudah di *scoring* sendiri oleh perusahaan yang menerbitkan laporan tersebut, dimana terdapat perbedaan pemahaman dalam melakukan penilaian pengungkapan tersebut pada masing-masing perusahaan.



Gambar 4.1.5K. Indikator Tanggung Jawab Produk Dalam Presentase (Laporan tahunan)



Gambar 4.1.5L. Indikator Tanggung Jawab Produk Dalam Presentase (Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan)

4.1.7 Aktiva

Total aktiva yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai total aktiva yang didapat dari data ICMD. Total aktiva berbentuk nilai nominal, oleh karena itu total aktiva harus di Ln kan terlebih dahulu kemudian diolah datanya untuk dianalisis.

4.1.8 Leverage

Leverage merupakan penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. Rasio

leverage yang didapat dari rumus pembagian antara total kewajiban dengan total aktiva. Data *leverage* sudah terdapat dalam ICMD, jadi dapat langsung dimasukkan tanpa menghitung kembali.

4.1.9 Profit

Penelitian ini menggunakan return on equity (ROE) sebagai nilai profit dari sebuah perusahaan. ROE diukur dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. ROE mencerminkan tingkat pengembalian terhadap investasi yang dilakukan. Nilai dari presentase ROE sudah terdapat dalam ICMD

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. . Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17. Berikut tabel yang menggambarkan analisis deskriptif perusahaan dengan data yang berasal dari laporan tahunan perusahaan :

Tabel 4.2.1A. Descriptive Statistics
Descriptive Statistics
Laporan tahunan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	282	.0294	1.0000	.380163	.1749238
Industri	282	.0000	1.0000	.358156	.4803107
Pemerintah	282	.0000	.9003	.033506	.1436985
Asing	282	.0000	.9909	.272717	.3028632
Publik	282	.0091	.9227	.303096	.1981571
Aktiva	282	3,062,000,000	112,857,000,000,000	5,165,748,725,294	12,361,486,250,462
<i>Leverage</i>	282	.0044	3.2100	.538047	.4110748
Profit	282	-3.2454	2.5445	0.0822	0.3873
Valid N (listwise)	282				

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.1A menunjukkan jumlah koresponden (N) sebanyak 282 perusahaan yang datanya diolah dari laporan tahunan maupun gabungan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Gambaran responden yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), jenis industri yang dibagi menjadi *high profile*, *low profile*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan variabel kontrolnya adalah total aktiva, *leverage*, dan profit.

Variabel tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,0294, maksimum sebesar 1, rata-rata 0,38 dan standar deviasi 0,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat kecil atau hampir tidak ada dan perusahaan yang mengungkapkan dengan lengkap pada satu populasi. Rata-rata sebesar 0,38 menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan. Nilai luas penyimpangan terhadap rata-rata lebih rendah daripada rata-rata menunjukkan bahwa perusahaan memiliki besaran yang hampir sama antar sesama populasi perusahaan.

Variabel independen selanjutnya yaitu kepemilikan pemerintah. Tidak banyak perusahaan dalam populasi penelitian ini yang memiliki kepemilikan pemerintah, hanya 18 perusahaan yang mempunyai kepemilikan pemerintah. Nilai minimum dari kepemilikan pemerintah adalah 0 dan maximumnya sebesar 0,9. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah terbesar adalah PT Kimia Farma Tbk sebesar 90,03% dan terdapat 264 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,033 dan standar deviasi sebesar 0,1434. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan yang luas dari rata-rata.

Kepemilikan asing memiliki nilai maximum sebesar 0,99, nilai minimum sebesar 0, rata-rata sebesar 0,27 dan standar deviasi sebesar 0,3. Nilai maximum yang sangat tinggi menandakan adanya perusahaan yang hampir semua kepemilikannya dimiliki oleh asing namun ada juga perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kepemilikan asing. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing tertinggi adalah PT Kokoh Inti Arebama Tbk sebesar 99,09% dan terdapat 108 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing. Tidak meratanya nilai kepemilikan asing pada perusahaan yang memiliki kepemilikan asing menyebabkan nilai standar deviasi melebihi nilai rata-rata.

Variabel independen terakhir adalah kepemilikan publik dengan nilai maximum sebesar 0,9227 dan nilai minimum sebesar 0,0091. Seluruh perusahaan dalam populasi penelitian ini memiliki kepemilikan publik. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik terbanyak adalah PT Skybee Tbk sebesar 92,27% dan perusahaan yang memiliki kepemilikan publik terendah adalah PT Kokoh Inti Arebama Tbk sebesar 0,91%. Rata-rata kepemilikan publik yang dimiliki perusahaan adalah 0,3 dan standar deviasi sebesar 0,197. Maka tidak terdapat penyimpangan yang luas terhadap rata-rata perusahaan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 dan hasilnya terdapat perbedaan antara analisis deskriptif dengan data yang berasal hanya dari laporan tahunan dan data yang berasal dari gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Berikut tabel yang menggambarkan statistik deskriptif dengan data yang berasal dari gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan :

Tabel 4.2.1B. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	282	.0294	1.0000	.378390	.1776085
Industri	282	.0000	1.0000	.358156	.4803107
Pemerintah	282	.0000	.9003	.033506	.1436985
Asing	282	.0000	.9909	.273058	.3026092
Publik	282	.0091	.9227	.304548	.1995505
Aktiva	282	3,062,000,00	112,857,000,000,00	5,190,761,044,44	12,381,364,670,69
<i>Leverage</i>	282	0	0	3	3
<i>Leverage</i>	282	.0044	3.2100	.538118	.4110734
Profit	282	-3.2454	2.5445	0.0820	0.3873
Valid N (listwise)	282				

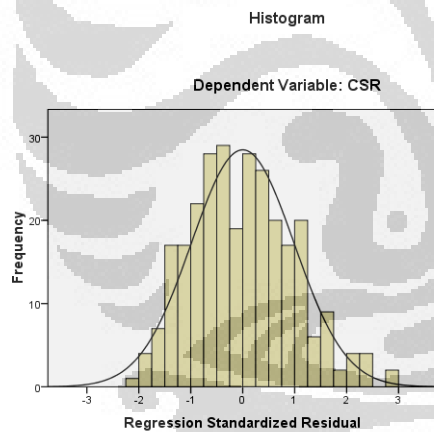
Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Pada awalnya data yang berasal dari gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan memiliki outliers. Outliers yang didapat adalah cases 119 untuk perusahaan PT Indika Energy. Tidak ada perbedaan yang besar antara sebelum dan sesudah outlier dibuang. Begitu pula pada tanggung jawab sosial perusahaan yang

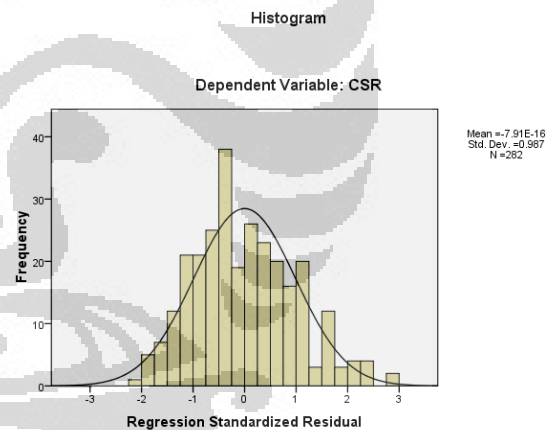
diungkapkan pada laporan tahunan dengan gabungan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, tidak ada perbedaan yang signifikan.

4.2.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dapat dilakukan dengan cara melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Selain itu uji normalitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data yang distribusi normal. . Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.



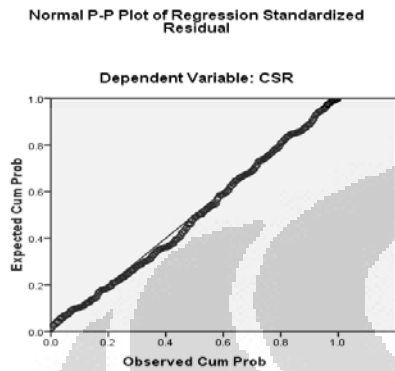
Gambar 4.2.2A. Grafik residual distribusi data normal laporan tahunan. (Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)



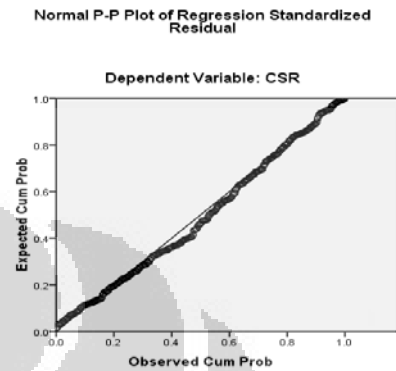
Gambar 4.2.2B. Grafik residual distribusi normal data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. (Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)

Gambar 4.2.2A menggambarkan grafik residual distribusi normal yang berasal dari data laporan tahunan sedangkan gambar 4.2.2B menggambarkan grafik residual distribusi normal yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Dapat dilihat dari kedua grafik tersebut bahwa bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetri, tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. Uji normalitas yang kedua menggunakan uji normal probability plot dengan hasil uji sebagai berikut :



Gambar 4.2.2C. grafik normal plot data laporan tahunan. (Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)



Gambar 4.2.2D. grafik normal pot laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. (Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)

Gambar 4.2.2C menggambarkan grafik normal plot yang berasal dari data laporan tahunan sedangkan gambar 4.2.2D menggambarkan grafik normal pot yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Grafik normal plot yang ada pada gambar 4.2.2C dan gambar 4.2.2D memperlihatkan titik-titik penyebaran mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola yang tidak melenceng baik ke kanan maupun ke kiri. Kondisi grafik tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi umumnya memenuhi asumsi normalitas, sehingga layak digunakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

Pengujian normalitas yang terakhir adalah menggunakan uji Kolmogorov – Sminov dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2.2C One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Laporan tahunan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Laporan tahunan

		Unstandardized Residual
N		282
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13996515
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.025
Kolmogorov-Smirnov Z		.889
Asymp. Sig. (2-tailed)		.408

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.2D One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan

		Unstandardized Residual
N		282
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14392398
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.025
Kolmogorov-Smirnov Z		1.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.165

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.2C menggambarkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov yang berasal dari data laporan tahunan sedangkan tabel 4.2.2D menggambarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel 4.2.2C dan tabel 4.2.2D menghasilkan suatu kesimpulan bahwa residual terdistribusi normal karena seluruh nilai dari variabel lebih besar dari atau tidak signifikan pada 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data layak pakai.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mengindikasikan adanya suatu hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel independent. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu

dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance pada model regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. Hasil uji multikolinearitas adalah :

Tabel 4.2.3A Uji Multikolinearitas

Coefficients^a
Laporan tahunan

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Industri	.936	1.069
Pemerintah	.916	1.092
Asing	.838	1.193
Publik	.842	1.188
Aktiva	.855	1.169
<i>Leverage</i>	.950	1.052
Profit	.940	1.064

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.3B Uji Multikolinearitas

Coefficients^a
Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Industri	.935	1.070
Pemerintah	.915	1.093
Asing	.836	1.197
Publik	.837	1.195
Aktiva	.853	1.172
<i>Leverage</i>	.951	1.052
Profit	.940	1.064

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.3A dan tabel 4.3.2B menunjukkan hasil perhitungan nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Selain itu *Variance Influen Factor* (VIF) mempunyai nilai dibawah 10. Kesimpulan dari uji multikolinearitas tersebut adalah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji korelasi spearman dan uji scatter plot. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

Tabel 4.2.3C. Uji Korelasi Spearman

Correlations		
Annual Report		
		Unstandardized Residual
Spearman's rho	Industri	.008
	Correlation Coefficient	.887
	Sig. (2-tailed)	282
	N	
	Pemerintah	.015
	Correlation Coefficient	.796
	Sig. (2-tailed)	282
	N	
	Asing	.003
Correlation Coefficient	.965	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Publik	.003	
Correlation Coefficient	.962	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Aktiva	.002	
Correlation Coefficient	.979	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Leverage	.018	
Correlation Coefficient	.758	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Profit	.071	
Correlation Coefficient	.236	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Unstandardized Residual	1.000	
Correlation Coefficient	.	
Sig. (2-tailed)	282	
N		

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.2.3D Uji Korelasi Spearman

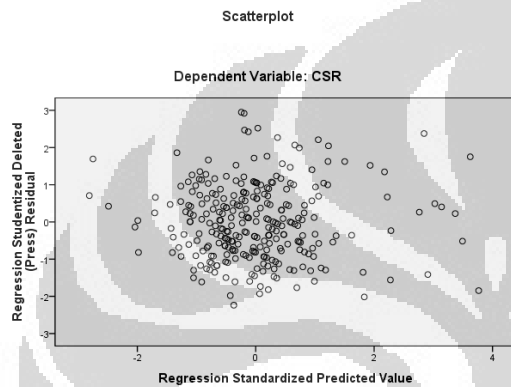
Correlations		
Annual Report dan Sustainability Report		
		Unstandardized Residual
Spearman's rho	Industri	-.002
	Correlation Coefficient	.974
	Sig. (2-tailed)	282
	N	
	Pemerintah	-.034
	Correlation Coefficient	.571
	Sig. (2-tailed)	282
	N	
	Asing	.008
Correlation Coefficient	.896	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Publik	-.003	
Correlation Coefficient	.955	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Aktiva	.000	
Correlation Coefficient	.995	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Leverage	-.013	
Correlation Coefficient	.833	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Profit	.082	
Correlation Coefficient	.169	
Sig. (2-tailed)	282	
N		
Unstandardized Residual	1.000	
Correlation Coefficient	.	
Sig. (2-tailed)	282	
N		

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

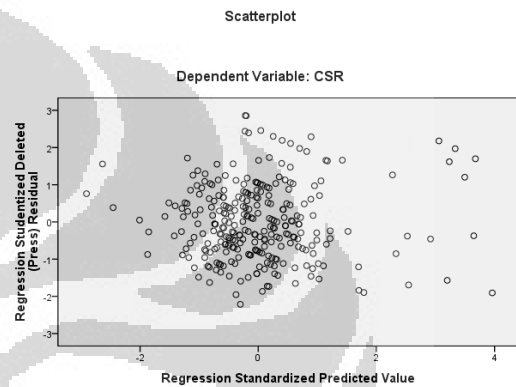
Tabel 4.2.3C menggambarkan hasil uji korelasi spearman yang berasal dari data laporan tahunan sedangkan tabel 4.2.3D menggambarkan hasil uji korelasi spearman yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan

menggunakan *program SPSS 17*. Hasil output pada kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi seluruh variabel independen dengan *unstandardized residual* nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas selanjutnya menggunakan uji scatterplot dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 4.2.3A. hasil uji scatter plot laporan tahunan
(Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)



Gambar 4.2.3B. hasil uji scatterplot laporan tahunan dan laporan keberlanjutan
(Sumber : data sekunder yang diolah; 2010)

Gambar 4.2.3A menggambarkan hasil uji scatter plot yang berasal dari data laporan tahunan sedangkan gambar 4.2.3B menggambarkan hasil uji scatterplot yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan menggunakan *program SPSS 17*. Tidak nampak banyak perbedaan diantara kedua gambar tersebut. Terlihat hasil output pada kedua gambar tersebut titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Dalam penelitian ini hanya meneliti satu tahun atau satu periode, sehingga tidak diperlukan adanya uji autokorelasi.

4.3 Uji Statistik

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menilai ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari *goodness of fit* nya secara statistik melalui uji adjusted R square, uji F serta uji t.

4.3.1 Uji *Adjusted R²* (Koefisien Determinasi)

Uji *Adjusted R²* dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan pergerakan variabel dependen dalam persamaan atau model yang akan diteliti. Hasil dari Uji *Adjusted R²* adalah :

Tabel 4.3.1A Uji Adjusted R²

Model Summary^b
Laporan tahunan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 ^a	.360	.343	.1417418	1.897

a. Predictors: (Constant), Profit, *Leverage*, Manajerial, Pemerintah, Industri, Publik, Aktiva, Asing

- Dependent Variable: CSR
- Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.3.1B. Uji Adjusted R²

Model Summary^b

Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 ^a	.343	.327	.1457508	1.887

a. Predictors: (Constant), Profit, *Leverage*, Manajerial, Pemerintah, Industri, Publik, Aktiva, Asing

b. Dependent Variable: CSR
Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.3.1A dengan olahan data laporan tahunan tahun 2010 menunjukkan nilai adjusted square sebesar 0,36. Nilai adjusted tersebut menjelaskan bahwa 36% variasi dalam tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen struktur kepemilikan dan jenis industri. Sisanya sebesar 64% ditentukan oleh variabel bebas lain diluar model. Tabel 4.3.1B bersumber dari olahan data gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bebas outlier. Adjusted

square yang dihasilkan sebesar 0,343. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dari tabel 4.3.3A. Variabel independen struktur kepemilikan dan jenis industri menjelaskan sebesar 34,3% tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sisanya sebesar 65,7% ditentukan oleh variabel bebas lainnya. Variabel bebas lain diluar model yang mungkin dapat mempengaruhi bisa seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, politik dan lain sebagainya.

4.3.2 Uji Signifikansi (Uji F)

Nilai F diturunkan dari pengujian ANOVA (*Analysis of variance*). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Uji F yang digunakan menggunakan data setelah kepemilikan institusional dihilangkan. Hasil dari uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.2A Uji Signifikansi

ANOVA ^b Laporan tahunan						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.093	7	.442	21.995	.000 ^a
	Residual	5.505	27	.020		
	Total	8.598	28			

a. Predictors: (Constant), Profit, *Leverage*, Manajerial, Pemerintah, Industri, Publik, Aktiva, Asing

b. Dependent Variable: CSR

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.3.2B. Uji Signifikansi

ANOVA ^b Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.043	7	.435	20.466	.000 ^a
	Residual	5.821	27	.021		
	Total	8.864	28			

a. Predictors: (Constant), Profit, *Leverage*, Manajerial, Pemerintah, Industri, Publik, Aktiva, Asing

b. Dependent Variable: CSR

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Hasil uji anova pada tabel 4.3.2A berasal dari pengolahan data pada laporan tahunan tahun 2010 menunjukkan nilai F hitung sebesar 21,995 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas lebih rendah dibandingkan batas nilai signifikan sebesar ($\alpha = 0,05$). Tabel 4.3.2B yang bersumber dari olah data gabungan laporan tahunan dan

laporan keberlanjutan tahun 2010 juga menunjukkan nilai F hitung sebesar 20,466 dengan probabilitas yang sama dengan tabel 4.3.2A. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu variabel independen dan variabel kontrol dapat digunakan secara bersama-sama dalam model.

4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2010. Penelitian dilakukan dengan uji regresi berganda pada program SPSS 17. Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.3.3A dan 4.3.3B.

Variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah variabel yang memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5%. Tabel 4.3.3A merupakan hasil olahan data hanya dari laporan tahunan 2010. Hasil olahan data tersebut menggambarkan bahwa variabel independen kepemilikan pemerintah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,000 dan variabel kontrol total aktiva perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tingkat signifikansi yang sama dengan kepemilikan pemerintah.

Tabel 4.3.3A. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a
Laporan tahunan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.880	.144		-6.104	.000		
Industri	.018	.018	.049	.974	.331	.936	1.069
Pemerintah	.349	.061	.287	5.682	.000	.916	1.092
Asing	-.014	.030	-.024	-.455	.649	.838	1.193
Publik	.021	.047	.024	.458	.648	.842	1.188
Aktiva	.044	.005	.445	8.512	.000	.855	1.169
Leverage	.009	.021	.020	.408	.684	.950	1.052
Profit	.020	.023	.045	.901	.368	.940	1.064

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.3.3B. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a
Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.770	.148		-5.195	.000		
Industri	.020	.019	.053	1.050	.295	.935	1.070
Pemerintah	.379	.063	.307	5.993	.000	.915	1.093
Asing	-.024	.031	-.041	-.765	.445	.836	1.197
Publik	.028	.048	.031	.580	.563	.837	1.195
Aktiva	.040	.005	.400	7.550	.000	.853	1.172
Leverage	-.001	.022	-.003	-.053	.958	.951	1.052
Profit	.025	.023	.054	1.078	.282	.940	1.064

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.3.3B berasal dari gabungan olahan data laporan tahunan laporan keberlanjutan 2010. Pada awalnya outlier dalam olah data tersebut. Outlier yang timbul adalah cases 119 untuk PT Indika Energy. Maka dari itu outlier tersebut tidak dimasukkan dalam pengujian ini. Setelah outlier dibuang, hasil uji t tidak mengalami banyak perbedaan. Variabel kepemilikan pemerintah dan variabel kontrol total aktiva perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hubungan struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Korelasi antara variabel melalui korelasi pearson ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.1A. Uji Korelasi Pearson
Correlations
Laporan tahunan

		CSR
CSR	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	282
Industri	Pearson Correlation	.171
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	282
Pemerintah	Pearson Correlation	.382
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	282
Asing	Pearson Correlation	-.125
	Sig. (2-tailed)	.036
	N	282
Publik	Pearson Correlation	.081
	Sig. (2-tailed)	.175
	N	282
Aktiva	Pearson Correlation	.523
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	282
Leverage	Pearson Correlation	-.068
	Sig. (2-tailed)	.256
	N	282
Profit	Pearson Correlation	.127
	Sig. (2-tailed)	.032
	N	282

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.4.1B. Uji Korelasi Pearson
Correlations
Laporan tahunan dan Laporan keberlanjutan

		CSR
CSR	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	282
Industri	Pearson Correlation	.168
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	282
Pemerintah	Pearson Correlation	.397
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	282
Asing	Pearson Correlation	-.145
	Sig. (2-tailed)	.015
	N	282
Publik	Pearson Correlation	.092
	Sig. (2-tailed)	.123
	N	282
Aktiva	Pearson Correlation	.490
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	282
Leverage	Pearson Correlation	-.089
	Sig. (2-tailed)	.138
	N	282
Profit	Pearson Correlation	.134
	Sig. (2-tailed)	.025
	N	282

Sumber : data sekunder yang diolah; 2010

Tabel 4.4.1.A diatas menunjukkan koefisien korelasi variabel independen antara jenis industri sebesar 0,17 terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,004. Pengaruh secara linier hubungan antara jenis industri dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan disebabkan karena pada perusahaan yang masuk dalam industri *high profile* atau perusahaan yang mempunyai dampak langsung dalam pemanfaatan lingkungan lebih memperhatikan dampak sosial khususnya dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

Koefisien korelasi kepemilikan pemerintah sebesar 0,382 terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat signifikansi 0,000. Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan secara linear terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat disebabkan oleh pemerintah sebagai regulator atau pembuat undang-undang terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah harus dapat menjadi *role model* bagi perusahaan lainnya dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu masyarakat menaruh harapan banyak terhadap perusahaan pemerintah dalam bidang sosial dan lingkungan karena pemerintah mewajibkan persero terbuka maupun perum untuk melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007.

Nilai korelasi kepemilikan asing sebesar -0,125 terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,036. Nilai korelasi negatif menandakan semakin rendah kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan asing terdiri dari ragam negara, untuk perusahaan dalam populasi ini, kepemilikan asing banyak dimiliki oleh asia. Negara di kawasan asia belum begitu memperhatikan isu-isu sosial jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Amerika. Oleh karena itu hal ini memungkinkan korelasi linear antara kepemilikan asing dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi negatif.

Pada variabel kontrol terdapat koefisien korelasi linear total aktiva perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,523 dengan tingkat signifikansi 0,000. Semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan lebih memperhatikan keseimbangan antara kinerja dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dampak sosial perusahaan sehingga meningkatkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Leverage* perusahaan dalam korelasi linear memiliki nilai tidak signifikan dan negatif atau berkebalikan. Nilai negatif menandakan semakin kecil tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin besar tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel kontrol profit pada kedua tabel menunjukkan pengaruh signifikan secara linier antara profit dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar profit yang diterima perusahaan, maka perusahaan akan semakin berusaha untuk melakukan aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai wujud keseimbangan keharmonisan dengan lingkungan sosial perusahaan.

Tabel 4.4.1B juga memberikan kesimpulan yang sama, yaitu variabel independen jenis industri, kepemilikan pemerintah, dan variabel kontrol total aktiva perusahaan mempunyai korelasi linear positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta variabel independen kepemilikan asing memberikan korelasi linier negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis industri berkorelasi positif sama halnya dengan tabel 4.4.1A yang disebabkan oleh industri *high profile* merupakan industri yang memanfaatkan dan mempunyai dampak secara langsung terhadap lingkungan sehingga industri tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan kebanyakan adalah perusahaan berjenis industri *high profile*. Kepemilikan pemerintah memiliki korelasi linier positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena umumnya perusahaan dengan kepemilikan pemerintah menerbitkan laporan keberlanjutan yang mewajibkan untuk melakukan program PKBL sehingga melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih. Variabel kontrol total aktiva juga memiliki korelasi linear positif terhadap tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena pada perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan adalah perusahaan yang memiliki aktiva yang besar sebagai dampak dari mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Sedangkan variabel independen kepemilikan asing memiliki korelasi linear negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sama seperti pada tabel 4.4.1A dimana kepemilikan asing terdiri dari ragam negara dan kepemilikan asing pada perusahaan dalam populasi ini umumnya berasal dari Asia sehingga tidak begitu memperhatikan isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih, pada umumnya tidak memiliki kepemilikan asing atau tingkat kepemilikan asing yang rendah.

4.4.2 Pengujian pengaruh struktur kepemilikan dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jenis industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis tersebut diuji melalui uji regresi linear berganda pada tabel 4.3.3A diperoleh p -value pada tingkat signifikansi sebesar 0,31 dan nilai hitung t yang positif. Nilai p -value tersebut lebih besar daripada $\alpha = 0,05$. Sedangkan pada tabel 4.3.3B diperoleh p -value pada tingkat signifikansi sebesar 0,295 dan nilai hitung t yang positif juga. Kedua hasil pengujian tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara jenis industri dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. dimana semakin besar jenis industri, maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi secara tidak signifikan. Maka dari itu hipotesis pertama tidak dapat dibuktikan sehingga hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian hipotesis pertama berbeda dengan hasil penelitian penelitian Yuningsih (2003) dan Sembiring (2005) yang menggunakan variabel industri yang dikelompokkan dalam industri *high profile* dan *low profile* memberikan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan

dapat dikarenakan jenis industri *low profile* sudah banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi secara keseluruhan, bukan parsial, perbedaan dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial antara jenis industri *high profile* dan *low profile* semakin menipis. Sehingga hipotesis atas jenis industri ini menjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pada awalnya penelitian ini mengikutsertakan hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya multikolinearitas membuat kepemilikan institusional dihilangkan. Keputusan untuk menghilangkan variabel independen kepemilikan institusional dikarenakan nilai signifikansi dari uji t kepemilikan institusional adalah nilai yang paling tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan jika dibandingkan dengan variabel independen lainnya.

Hipotesis selanjutnya adalah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.3.3A dihasilkan nilai p -value pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai hitung t positif. Nilai p value lebih rendah dari pada $\alpha = 0,05$. Tabel 4.3.3B juga memperoleh nilai p -value yang lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ serta t hitung yang positif. Hal ini berarti kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar kepemilikan pemerintah yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian terhadap pengaruh kepemilikan pemerintah konsisten dengan penelitian Pian PK (2010) bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaruh kepemilikan pemerintah ini dapat disebabkan oleh perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah lebih diperhatikan oleh pemangku kepentingannya termasuk pemerintah sendiri. Perhatian tersebut mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapannya. Selain itu pemerintah sudah mengatur pelaksanaan

tanggung jawab sosial pada undang-undang PT No : 40 tahun 2007 dan kewajiban bagi persero terbuka untuk melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Hipotesis ketiga adalah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis ini tidak dapat dibuktikan atau ditolak karena berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.3.3A dan tabel 4.3.3B menunjukkan bahwa nilai t hitung negatif serta p -value yang lebih besar dari pada $\alpha = 0,05$. Nilai p -value sebesar 0,649 pada tabel 4.3.3A dan nilai p -value sebesar 0,445 pada tabel 4.3.3B. Kedua nilai pada tabel tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menandakan tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai t hitung negatif mengindikasikan adanya hubungan korelasi negatif antara kepemilikan asing dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh semakin kecilnya tingkat kepemilikan asing oleh perusahaan.

Hasil penelitian hipotesis ketiga mengenai pengaruh kepemilikan asing sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008) bahwa struktur kepemilikan saham termasuk kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006. Kepemilikan asing mempunyai tingkat *concern* yang berbeda-beda terhadap isu sosial. Kepemilikan asing negara Eropa dan Amerika lebih memperhatikan isu-isu sosial tersebut dibandingkan dengan kepemilikan asing lainnya. Kepemilikan asing pada populasi ini banyak berasal dari asia. Oleh karena itu secara keseluruhan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan.

Hipotesis terakhir adalah kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai p -value pada tingkat signifikansi serta nilai t hitung pada tabel 4.3.3A menunjukkan bahwa nilai p -value sebesar 0,648 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi serta menghasilkan nilai t hitung yang positif. Tabel 4.3.3B menunjukkan nilai p -value sebesar 0,563 dan

nilai t hitung yang positif. Kedua tabel tersebut mengkondisikan bahwa terdapat korelasi positif namun kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika kepemilikan publik meningkat maka secara tidak signifikan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga akan meningkat. Maka hipotesis terakhir ini tidak dapat dibuktikan atau ditolak.

Hasil penelitian pengaruh kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini konsisten dengan hasil penelitian Badjuri (2011) bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik seharusnya lebih bertanggung jawab moral terhadap isu atau dampak sosial karena perusahaan tersebut menunjukkan kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam pemberian dividen sehingga diasumsikan going concern perusahaan tetap terjaga dan melakukan pengungkapan sosial lebih banyak. Kondisi yang mungkin menyebabkan kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan adalah adanya kepentingan manajemen laba dan kepentingan investor yang lebih memfokuskan pada laba yang bisa diperoleh dari hasil investasinya.

Nilai adjusted R square pada tabel 4.3.1A dan 4.3.1B menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik serta jenis industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 34,3% untuk tabel 4.3.1A dan sebesar 32,7% pada tabel 4.3.1B. Masih banyak pengaruh variabel bebas lainnya diluar model yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.4.3 Pengujian pengaruh total aktiva, *leverage*, dan profit perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah total aktiva, *leverage*, dan profit perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Gray et al., (2001), Sembiring (2003), dan Siregar&Bachtiar (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui

total aktiva. Oleh karena itu total aktiva dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini. Tabel 4.3.3A dan tabel 4.3.3B menghasilkan nilai *p*-value yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *level of significance* 0,05. Nilai *p*-value sebesar 0,000 dan nilai *t* hitung positif menjelaskan bahwa total aktiva perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi ini dapat dikarenakan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki pemegang saham yang mungkin lebih memperhatikan terhadap tanggung jawab sosial yang akan diungkapkan pada laporan keuangan (Cowen et al, 1987).

Leverage perusahaan pada hasil penelitian Sembiring (2005) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008) yakni bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang diprosikan dalam adanya variabel manajemen laba sebagai hal yang mendasari kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil tersebut serupa pada uji regresi persamaan linier dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh tabel 4.3.B, *leverage* perusahaan memiliki korelasi negatif dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini ditandai dengan diperolehnya nilai negatif pada *t* hitung di kedua tabel tersebut. Serta nilai *p*-value yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi ini berkebalikan dengan tabel 4.3.3A dimana nilai *t* hitung pada tabel tersebut adalah positif dengan probabilitas tidak berpengaruh signifikan yang berarti semakin besar nilai *leverage* maka semakin besar pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara tidak signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan karena pada tabel 4.3.3B dimana terdapat penggantian 14 laporan tahunan perusahaan dengan *sustainability perusahaan* pada perusahaan yang memiliki nilai *leverage* kecil dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang besar sehingga nilai *t* hitung menjadi berbalik negatif.

Variabel kontrol yang terakhir adalah profit. Berdasarkan penelitian terdahulu, profit yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini melalui uji regresi linear berganda, penelitian tersebut tidaklah sama. Nilai p -value yang lebih besar dari *level of significance* 0,05 menandakan tidak ada pengaruh signifikan profit perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai t hitung yang positif menandakan ada korelasi positif antara profit dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Korelasi positif tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patten (1991), Sembiring (2003) serta Hackston & Milne (1996).



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, pemerintah, asing dan publik serta jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta melakukan perbandingan hasil dari data yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan dengan data gabungan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari kedua data penelitian ini adalah sama yaitu hanya kepemilikan pemerintah yang berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti semakin besar perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, asing, dan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 mengharuskan seluruh BUMN untuk melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam hal ini terdapat 20 perusahaan BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Secara otomatis 20 perusahaan BUMN tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai Peraturan Menteri negara BUMN yang menuntut pelaporan tanggung jawab sosial lebih detail dan komprehensif dibandingkan perusahaan lainnya sehingga kepemilikan pemerintah menjadi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam penelitian ini ada hal yang menarik mengenai kepemilikan asing, yaitu dihasilkannya t negatif dengan probabilitas tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini terjadi karena kepemilikan asing yang dimaksud adalah gabungan dari banyak Negara. Mayoritas kepemilikan asing yang dimiliki oleh asia yang pada umumnya belum memperhatikan aspek atau

dampak sosial jika dibandingkan dengan negara Amerika dan Eropa. Kesimpulan ini serupa dengan penelitian Novita (2008).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan GRI G3.1 sebagai acuan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan. Acuan GRI G3.1 ini sebenarnya ditujukan untuk perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sehingga banyak pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di laporan tahunan yang belum sesuai dengan indikator GRI G3.1. Tidak adanya bentuk baku dari penerapan indikator GRI G3.1 juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan cara skoring oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan.

Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu periode yaitu tahun 2010. Hal ini memungkinkan suatu perusahaan pada tahun sebelumnya atau sesudahnya melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial akan tetapi pada tahun 2010 tidak melakukan tanggung jawab tersebut dikarenakan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu.

5.3 Saran

5.3.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan hanya dalam periode satu tahun. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan kurun waktu atau periode yang lebih panjang. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.3.2 Saran untuk Perusahaan

Perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial disarankan untuk melakukan pengungkapan tersebut secara lengkap, jelas, dan detail dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Terdapat beberapa perusahaan yang hanya mengungkapkan aktivitas ekonomi dan kinerja perusahaannya saja dalam laporan

tahunan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, mendapatkan dukungan dari lingkungan dan masyarakat sekitar terhadap tujuan pencapaian perusahaan.

5.3.2 Saran untuk Investor

Investor pada dasarnya memfokuskan kepada perolehan deviden dan *capital gain* dari hasil investasinya. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada investor dan calon investor untuk juga ikut bersama-sama dalam mendorong perusahaan untuk mulai melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara investor memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik.

5.3.3 Saran untuk Pemerintah atau Regulator

Pemerintah atau regulator disarankan untuk membuat peraturan yang lebih mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan tidak hanya terbatas untuk perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi juga untuk jenis industri lainnya. Selain itu pemerintah atau regulator juga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran yang khususnya berpengaruh pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya (dampak sosialnya).

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Fr. Reni Anggraini. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Asian Development Bank. (2000). Corporate Governance and Finance in East Asia : a Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philipines, and Thailand. *Consolidated Report Vol 1*.
- Badjuri. (2011). Faktor-faktor fundamental, mekanisme corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, hal 38-54.
- Bapepam. Peraturan Bapepam Tentang Good Corporate Governance. www.bapepam.go.id
- Belkaoui, A. dan PG. Karpik. (1989). Determinants of The Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol 2, No. 1, Hal 36-51.
- Boone dan Kurtz. (2007). Pengantar Bisnis Kontemporer, Salemba Empat. Jakarta.
- Cadbury, Adrian. (1999). Corporate Governance : A framework For Implementation. *World Bank Publication*.
- Carrol, Archie. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of Organizational Stakeholders. *Business Horizon*, hal. 17-25.
- Claessens, S. dan Fan, J.P.H., (2002). Corporate Governance in Asia: a Survey, *International Review of Finance*, vol.3, no.2, pp. 71-103.
- Claessens, S., Djankov, S. dan Lang, L., (2000). The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, *Journal of Financial Economics*, vol. 58, no. 1-2, pp. 81-112.
- Darrough, Masako N. (1993). Disclosure Policy and Competition: Cournot vs Bertrand, *The Accounting Review*, Vol. 66, No. 3, hal 534-561.
- Deegan, C., Rabkin, M., & Vought, P. (2000). Firm's disclosure reaction to major social incidents : Australian evidence. *Accounting Forum*, Vol. 24, No. 1, hal 101-130.

- Dellaportas, S., Gibson, K., Alaglah, R., Hutchinson, M., Leung, P. dan Van Hoving, D. (2005). *Ethocs, Governance & Accountability*, Milton, Qld : John Wiley & Son. Australia.
- Diana Zuhroh dan I Putu Pande Heri Sukmawati. (2003). Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus pada Perusahaan High-Profile di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Dilling. (2009). Sustainability reporting in a global context : What Are The Charaterstics of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports- An Empirical Analysis. *International Business and Economics Journal*.
- Diyah dan Erman. (2009). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan : Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura*. Vol 12, No 1, hal 71-86.
- Elkington,J. (1997). *Canibals With Forks : The Triple Bottom Line of 21st century business*. Capstone : Oxford.
- Fahrizqi. (2010). Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Oelaporan Tahunan Perusahaan. Universitas Diponegoro.
- Farida, Siti. (2012). Analisis Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Cost of Equity Capital : Studi Empiris Pada Perusahaan Publik di Indonesia Yang Menerbitkan Sustainability Report Tahun 2006-2010. Skripsi S1. Universitas Indonesia.
- Farook, Sayd dan Roman Lanis. (2005). *Banking On Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure*.
- Freeman, R.E. Wicks, C.A., Parmar. (2004). Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited. *Jstor journal*. Vol 15, No. 3 hal 364-369.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Global Reporting Initiatives (GRI). (2006). *Sustainability Reporting Guidelines*. Amsterdam.
- Global Reporting Initiatives (GRI). (2009). *Sustainability Reporting Guidelines*. Amsterdam.

Global Reporting Initiatives (GRI). (2011). Sustainability Reporting Guidelines. Amsterdam.

Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting. A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, hal. 47-77.

Hackston, D., dan M.J. Milne. (1996). —Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 9, No. 1, hal 77-108.

Hendriksen, Eldon S, dan Michael F Van Breda. (1991). Teori Akuntansi (terjemahan). Jakarta: Erlangga. hal. 203.

Jensen, G.R; Solberg dan T.S.Zorn. (1992). Simultaneous Determinant of Insider ownership, debt and dividend policies. *Journal of financial and quantitative analysis*.

Jensen, Michael C. and William H. Meckling. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3. hal 305-360.

Kaihatu. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Ekonomi Manajemen. www.petra.ac.id.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006. Jakarta.

La Porta et al, (1999). Corporate Ownership Around the world. *The Journal of Finance*. Vol. 54 No. 2. Hal 471-517.

Letza, S., Sun, X. dan Kirkbride, J. (2004). Shareholder Versus Stakeholder: a Critical Review of Corporate Governance, *Corporate Governance: an International Review*, vol. 12, no. 3, pp. 242-262.

Luck, Nabarro LLP, (2008). The Listing Rules. www.londonstockexchange.com

Lukviarman. (2004). Etika Bisnis Tak berjalan di Indonesia : Ada Apa Dalam Corporate Governance??. *Jurnal Siasat Bisnis*, 139-156.

Lukviarman. (2005). Perspektif Shareholder Versus Stakeholder di Dalam Memahami Fenomena Corporate Governanace. *Jurnal Siasat Bisnis*, 141-161.

- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi 11.
- Mathiesen, H. (2004). Empirical studies on ownership structure and performance. <http://www.encycogov.com>.
- Nor Hadi. (2011). Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nurlela dan Islahuddin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23-24 Juli 2008.
- OECD. (1999). OECD Principles of Corporate Governance, OECD *Publication Service*, Paris.
- OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance, OECD *Publication Service*.
- Pemerintah Indonesia. (2007). UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pian (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan di Indonesia, Universitas Diponegoro.
- Ratnaningsih, Dewi dan Jogiyanto Hartono. (2001). Conclit of interest problem in the management – controlled Firms. *Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.243.
- Rawi. (2008). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi, dan *Leverage* terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Tesis S2. Universitas Diponegoro.
- Roberts, W. Robin. (1992). Determinants of Corprate Social Recessibility Disclosure An Aplication of Stakeholder Theory. *Accounting Organiation and Society*. Vol.17, No.6, pp 595-612.
- Sembiring, Eddy Rismanda. (2005). —Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.

- Shleifer, A., & Vishny. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52 (2), 737-783.
- Siagian. (2011). Ownership Structure and Governance Implementation : Evidence From Indonesia. *International Journal of Business, Humanities, and Technology*. Vol 1, No 3.
- Siregar, S., & Bachtiar Y. (2010). Corporate Social Reporting : Empirical Evidence From Indonesia Stock Exchange. *International Journal Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 3, No. 3, hal 241-252.
- Solihin, Ismail. (2009). Corporate Social Responsibility from charity to sustainability. Salemba Empat. Jakarta.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy : Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Journal*, Vol. 20, No. 3, hal 571-610.
- Suharto (2008). Menggagas Standar Audit Program CSR. [www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/CSRAudit.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf).
- Suharto, Edi (2008a), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta (Cetakan Kedua)
- Tarjo, (2008). Pengaruh Kosentrasi Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta cost of equity capital". Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Untung, Hendrik Budi. (2008). Corporate Social Responsibility. Sinar Grafika. Jakarta.
- Van Horn, J.C dan Wachowicz, J.M. (1997). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.
- Wibisono. (2007). Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. *Fascho Publishing*. Jatim.
- Wisnu (2009). Corporate Social Responsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan di Sekitarnya. www.wisnu.blog.uns.ac.id
- World Bank. (1999). www.worldbank.org
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2000). WBCSD's first report –Corporate Social Responsibility. Geneva.

Lampiran 1 : Hasil pengujian utama oleh data annual report menggunakan program SPSS 17

Descriptive Statistics			
Model	Mean	Std. Deviation	N
Model	100710	173000	200
Intercept	100710	173000	200
Persewaan	103000	143000	200
Model	121710	200000	200
Intercept	121710	200000	200
Persewaan	121710	200000	200
Model	103000	143000	200
Intercept	103000	143000	200
Persewaan	103000	143000	200

Correlations										
Model	Intercept	Persewaan	Angka	Publik	Angka	Publik	Intercept	Persewaan	Angka	Publik
Model	1									
Intercept		1								
Persewaan	.71		1							
Angka	.17	1.00		1						
Publik	.20	.20	.70		1					
Model						1				
Intercept	.02	.02	.02	.02	.02		1			
Persewaan	.02	.02	.02	.02	.02	.02		1		
Angka	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02		1	
Publik	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02		1
Intercept	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02	

Variables in the Model			
Model	Collinearity Statistics	Tolerance	VIF
Model			
Intercept		1.000	1.000
Persewaan		.710	1.408
Angka		.983	1.017
Publik		.983	1.017

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change in R Square
Model	.822	.676	.672	121710	.000

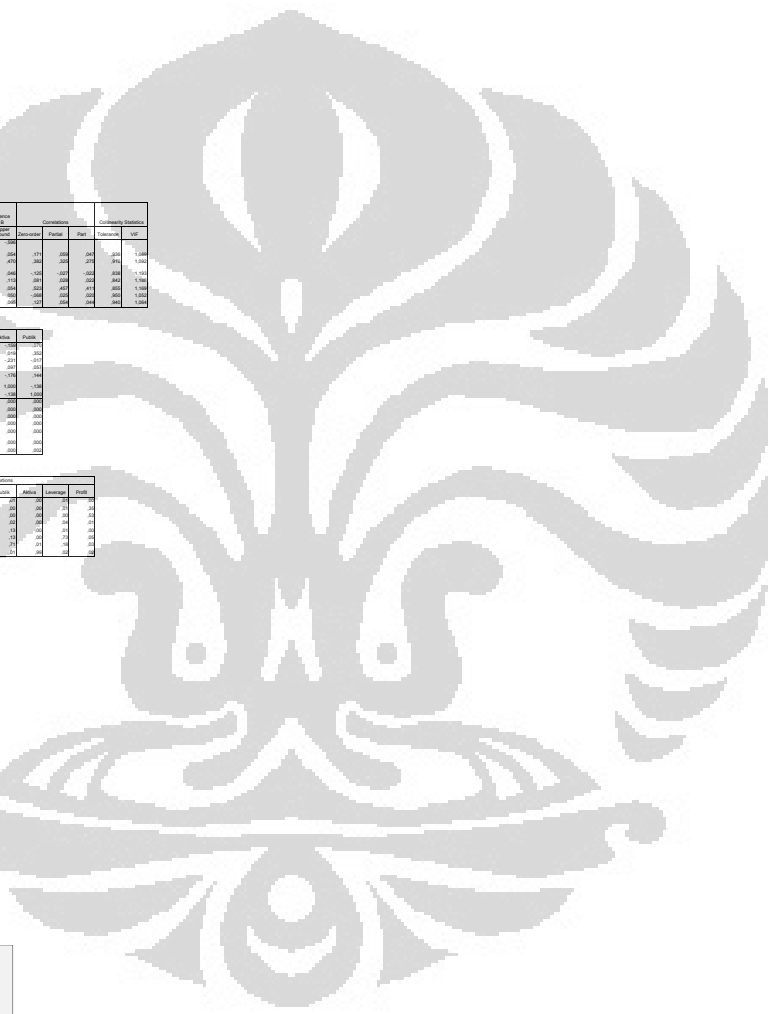
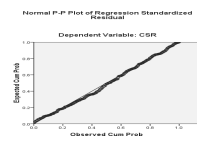
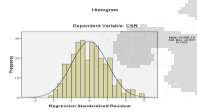
ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model	1.000	1	1.000	273.00	.000
Residual	1.000	198	.005		
Total	2.000	199			

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	Tolerance
						B	Lower Bound		
Model	Intercept	100710	.000	100710	.000	100710	100710		1.000
Model	Persewaan	103000	.710	103000	.000	103000	103000		.710
Model	Angka	121710	.020	121710	.000	121710	121710		.983
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000	103000		.983
Model	Angka	103000	.020	103000	.000	103000	103000		.983
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000	103000		.983
Model	Intercept	100710	.000	100710	.000	100710	100710		1.000
Model	Persewaan	103000	.710	103000	.000	103000	103000		.710
Model	Angka	121710	.020	121710	.000	121710	121710		.983
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000	103000		.983
Model	Intercept	100710	.000	100710	.000	100710	100710		1.000
Model	Persewaan	103000	.710	103000	.000	103000	103000		.710
Model	Angka	121710	.020	121710	.000	121710	121710		.983
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000	103000		.983

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B
Model	Intercept	100710	.000	100710	.000	100710
Model	Persewaan	103000	.710	103000	.000	103000
Model	Angka	121710	.020	121710	.000	121710
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000
Model	Angka	103000	.020	103000	.000	103000
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000
Model	Intercept	100710	.000	100710	.000	100710
Model	Persewaan	103000	.710	103000	.000	103000
Model	Angka	121710	.020	121710	.000	121710
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000
Model	Angka	103000	.020	103000	.000	103000
Model	Publik	103000	.020	103000	.000	103000

Collinearity Diagnostics ^a										
Model	Collinearity Statistics	Tolerance	Eigenvalue							
			1	2	3	4	5	6	7	
Model	1	1.000	1.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	2	.710	.710	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	3	.983	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	4	.983	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	5	.983	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	6	.983	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Model	7	.983	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Residual Statistics			
Model	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Model	100710	100710	173000
Intercept	100710	100710	173000
Persewaan	103000	103000	143000
Angka	121710	121710	200000
Publik	103000	103000	143000
Angka	103000	103000	143000
Publik	103000	103000	143000
Intercept	100710	100710	173000
Persewaan	103000	103000	143000
Angka	121710	121710	200000
Publik	103000	103000	143000
Angka	103000	103000	143000
Publik	103000	103000	143000



Lampiran 2 : Hasil pengujian stastis data annual report dan sustainability report menggunakan program SPSS 17

Descriptive Statistics			
Model	Statistic	df	N
CSR	1717020	282	282
Mean	6087.801	282	282
Standard Deviation	1436881	282	282
Minimum	333334	282	282
Maximum	272058	282	282
Range	238724	282	282
Sum	1717020	282	282
Variance	2065000000	282	282
Std. Dev.	45438.92	282	282

Correlations										
Model	Statistic	df	Statistic	df	Statistic	df	Statistic	df	Statistic	df
Correlation	CSR	Industri	Perdagangan	Angg	Publik	Advis	Lingkungan	Profit		
Correlation	Industri	.588								
Correlation	Perdagangan	.588	.588							
Correlation	Angg	.588	.588	.588						
Correlation	Publik	.588	.588	.588	.588					
Correlation	Advis	.588	.588	.588	.588	.588				
Correlation	Lingkungan	.588	.588	.588	.588	.588	.588			
Correlation	Profit	.588	.588	.588	.588	.588	.588	.588		

Variable Entered/Removed			
Model	Entered	Removed	Method
1	CSR		Stepwise (Criteria)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics
1	.588	.345	.321	1637.000

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5933	1	5933	41.1	<.001
Residual	5.631	274	.021		
Total	8.864	281			

Coefficients ^a												
Model		Unstandardized Coeff.	Standardized Coeff.	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B			Lower Bound	Upper Bound	Collinearity Statistics	
						B	Lower Bound	Upper Bound				
1	(Constant)	7.735		1.048	.300	5.502	9.968					
1	CSR	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Industri	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Perdagangan	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Angg	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Publik	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Advis	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Lingkungan	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	
1	Profit	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003	.001	1.000	

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coeff.	Standardized Coeff.	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B			Collinearity Statistics
						B	Lower Bound	Upper Bound	
1	(Constant)	7.735		1.048	.300	5.502	9.968		
1	CSR	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Industri	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Perdagangan	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Angg	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Publik	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Advis	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Lingkungan	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003
1	Profit	.001	.588	1.000	.317	-.001	.003	-.001	.003

Collinearity Diagnostics ^a											
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Tolerance							
				(Constant)	Industri	Perdagangan	Angg	Publik	Advis	Lingkungan	Profit
1	1	4.433	1.000	.999	.999	.999	.999	.999	.999	.999	.999
1	2	1.027	2.062	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001
1	3	.202	4.741	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	4	.047	9.724	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	5	.014	24.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	6	.004	30.836	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	7	.001	55.833	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics
1	.588	.345	.321	1637.000
2	.588	.345	.321	1637.000
3	.588	.345	.321	1637.000
4	.588	.345	.321	1637.000
5	.588	.345	.321	1637.000
6	.588	.345	.321	1637.000
7	.588	.345	.321	1637.000
8	.588	.345	.321	1637.000
9	.588	.345	.321	1637.000
10	.588	.345	.321	1637.000

